



LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2019, yang berisi laporan gambaran umum daerah dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta kinerja sepanjang tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan ini secara teknis mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,. Laporan disusun sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pacitan, Maret 2020

BUPATI PACITAN

INDARTATO

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	vii
Kata Pengantar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	16
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	31
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	33
2.1. Capaian Kinerja Makro	33
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	34
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	38
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	278
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Usuran Pemerintahan.....	345
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	361
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	412
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.....	414
3.1.1. Target Kinerja	415
3.1.2. Realisasi	417

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.....	419
3.1.3. Target Kinerja.....	419
3.1.4. Realisasi.....	420
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	420
3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	421
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	422
4.1. Urusan Pendidikan.....	419
4.2. Urusan Kesehatan.....	430
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	447
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	454
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	461
4.6. Urusan Sosial.....	468
BAB V PENUTUP.....	476

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	5
Tabel 1.2	Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.....	6
Tabel 1.3	Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	7
Tabel 1.4	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8
Tabel 1.5	Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai per 31 Desember 2020	13
Tabel 1.6	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	15
Tabel 1.7	Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2020	28
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Pacitan 2019-2020 .	33
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat Capaian Kinerja Keluaran.....	38
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat Capaian Kinerja Hasil.....	279
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	346

Tabel 2.5	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020.....	362
Tabel 2.6	Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 1.....	364
Tabel 2.7	Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3.....	365
Tabel 2.8	Program pendukung sasaran.....	367
Tabel 2.9	Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 1.....	368
Tabel 2.10	Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 2.....	369
Tabel 2.11	Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 3.....	370
Tabel 2.12	Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 2.....	374
Tabel 2.13	Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 1.....	370
Tabel 2.14	Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 2.....	374
Tabel 3.1	Target Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat.....	415
Tabel 3.2	Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah.....	417
Tabel 3.3	Target Kinerja Tugas Pembantuan yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	419
Tabel 3.4	Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah ...	420
Tabel 4.1	Target Pencapaian Bidang Pendidikan.....	422
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian Bidang Pendidikan.....	423
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan.....	425
Tabel 4.4	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan.....	428
Tabel 4.6	Target Pencapaian Bidang Kesehatan.....	430
Tabel 4.7	Realisasi Pencapaian Bidang Kesehatan.....	433
Tabel 4.8	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan.....	436
Tabel 4.9	Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan.....	440

Tabel 4.10	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan.....	441
Tabel 4.11	Target Pencapaian Bidang Pekerjaan Umum.....	448
Tabel 4.12	Realisasi Pencapaian Bidang Pekerjaan Umum.....	449
Tabel 4.13	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	450
Tabel 4.14	Dukungan Personel SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	452
Tabel 4.15	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	452
Tabel 4.16	Target Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat.....	455
Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat.....	456
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	457
Tabel 4.19	Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	458
Tabel 4.20	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	460
Tabel 4.21	Target Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	461
Tabel 4.22	Realisasi Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	463
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	465
Tabel 4.24	Dukungan Personel SPM Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	466
Tabel 4.25	Target Pencapaian Bidang Sosial.....	469
Tabel 4.26	Realisasi Pencapaian Bidang Sosial.....	470
Tabel 4.27	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial.....	472
Tabel 4.28	Dukungan Personel SPM Bidang Sosial.....	475

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021	22
---------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan amanah Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta membuat Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Bupati Pacitan setiap tahun yang disampaikan ke DPRD telah mendapat respon positif, hal ini dibuktikan dengan adanya pembahasan serta catatan strategis dari DPRD yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif yang pada hakekatnya mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kesetaraan kedudukan tersebut bermakna bahwa di antara kedua lembaga Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi satu sama lainnya

(checks and balance).

Penyusunan LPPD Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi penyelenggaraan **(Progress Report)** Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi yang diklasifikasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menggambarkan perkembangan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan bersama DPRD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km², dimana secara administratif terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km². Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km².

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 24,26mm³, sedangkan curah hujan terkecil pada bulan September sebesar 2,19mm³.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

USIA	2020					
	L	%	P	%	Jumlah	%
0-4Thn	12.399	2,08	11.728	1,96	24.127	4,04
5-9Thn	17.575	2,94	16.459	2,75	34.034	5,70
10-14Thn	20.495	3,43	19.324	3,23	39.819	6,66
0-14 Thn	50.469	8,45	47.511	7,95	97.980	16,40
15-19Thn	19.996	3,35	18.753	3,14	38.749	6,49
20-24Thn	22.097	3,70	20.944	3,51	43.041	7,20
25-29Thn	22.011	3,68	20.450	3,42	42.461	7,11
30-34Thn	20.732	3,47	20.047	3,36	40.779	6,83
35-39Thn	23.018	3,85	21.940	3,67	44.958	7,52
40-44Thn	19.933	3,34	19.185	3,21	39.118	6,55
45-49Thn	20.936	3,50	21.557	3,61	42.493	7,11
50-54Thn	22.832	3,82	23.021	3,85	45.853	7,67
55-59Thn	20.861	3,49	21.771	3,64	42.632	7,14
60-64Thn	18.167	3,04	19.127	3,20	37.294	6,24
15-64 Thn	210.583	35,25	206.795	34,61	417.378	69,86
>65Thn	38.672	6,47	43.443	7,27	82.115	13,74
Jumlah	299.724	50,17	297.749	49,83	597.473	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2020 mencapai 597.473 jiwa terdiri atas 299.724 jiwa penduduk laki – laki dan 297.749 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 417.378 jiwa atau mencapai 69,86 % total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	192.415	32,20
2	Perikanan / Kelautan	1.379	0,23
3	Pertambangan/ Industri	167	0,03
4	Perdagangan	3.539	0,59
5	Angkutan/ Transportasi	878	0,15
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	172.674	28,90
7	Jasa – jasa	1.152	0,19
8	Pemerintahan	11.048	1,85
9	Kesehatan	357	0,06

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
10	Pendidikan	2.419	0,40
11	Keagamaan	39	0,01
12	Lain – lain		-
	- Pensiunan	4.212	0,70
	- Belum/tdk bekerja	86.719	14,51
	- Mengurus rumah tangga	34.403	5,76
	- Pelajar mahasiswa	86.072	14,41
Jumlah		597.473	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 32,20 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak mempunyai ijazah	139.326	23,32
2	Tamat SD	220.592	36,92
3	Tamat SLTP	120.016	20,09
4	Tamat SLTA/ sederajat	91.800	15,36
5	Tamat D2	2.552	0,43
6	Tamat D3/ Akademi	2.699	0,45
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	20.488	3,43
Jumlah		597.473	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Berdasarkan dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jumlah kecamatan dan desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Kecamatan Donorojo	Sawahan
		Kalak
		Sendang
		Klepu
		Gedompol
		Cemeng
		Gendaran
		Sukodono
		Sekar
		Donorojo
2	Kecamatan Punung	Belah
		Widoro
		Bomo
		Sooko
		Punung
		Mendolo Kidul
		Piton

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Kendal
		Wareng
		Mantren
		Ploso
		Mendolo Lor
		Kebonsari
		Gondosari
		Tinatar
3	Kecamatan Pringkuku	Dersono
		Sugihwaras
		Watukarung
		Jlubang
		Candi
		Poko
		Dadapan
		Pringkuku
		Sobo
		Ngadirejan
		Glinggangan
		Pelem
		Tamanasri
4	Kecamatan Pacitan	Pacitan
		Pucangsewu
		Sidoharjo
		Ploso
		Baleharjo
		Kembang
		Sukoharjo
		Kayen
		Sirnoboyo
		Arjowinangun
		Bangunsari
		Sedeng
		Sumberharjo
		Tanjungsari
		Menadi
		Mentoro
		Purworejo
		Nanggung

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Widoro
		Semanten
		Sambong
		Banjarsari
		Bolosingo
		Ponggok
		Tambakrejo
5	Kecamatan Arjosari	Sedayu
		Tremas
		Arjosari
		Gunungsari
		Pagutan
		Gembong
		Borang
		Gegeran
		Kedungbendo
		Mangunharjo
		Temon
		Karanggede
		Karangrejo
		Jetis Kidul
		Gayuhan
		Jatimalang
		Mlati
6	Kecamatan Kebonagung	Plumbungan
		Karangnongko
		Kalipelus
		Karanganyar
		Katipugal
		Klesem
		Sidomulyo
		Worawari
		Mantren
		Gawang
		Kebonagung
		Purwoasri
		Banjarjo
		Sanggrihan
		Punjung

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Gembuk
		Ketro
		Ketepung
		Wonogondo
7	Kecamatan Nawangan	Gondang
		Mujing
		Nawangan
		Sempu
		Jetis Lor
		Tokawi
		Penggung
		Pakis Baru
		Ngromo
8	Kecamatan Bandar	Petrungsinarang
		Ngunut
		Bandar
		Kledung
		Tumpuk
		Watupatok
		Bangunsari
		Jeruk
9	Kecamatan Tegalombo	Kebondalem
		Gedangan
		Ngreco
		Kasihani
		Pucangombo
		Gemaharjo
		Ploso
		Tegalombo
		Kemuning
		Tahunan
		Tahunan Baru
10	Kecamatan Tulakan	Jetak
		Nglaran
		Wonoanti
		Padi
		Kluwih
		Bungur
		Tulakan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Jatigunung
		Gasang
		Kalikuning
		Ngile
		Bubakan
		Losari
		Ngumbul
		Wonosidi
		Ketro
11	Kecamatan Ngadirojo	Sidomulyo
		Hadiwarno
		Hadiluwih
		Tanjungpuro
		Pagerejo
		Wiyoro
		Ngadirojo
		Cokrokembang
		Bodag
		Tanjung lor
		Nogosari
		Cangkring
		Bogoharjo
		Wonodadi Wetan
		Wonodadi Kulon
		Wonokarto
		Wonosobo
		Wonoasri
12	Kecamatan Sudimoro	Pager Kidul
		Pager Lor
		Sukorejo
		Sudimoro
		Ketanggung
		Klepu
		Sumber Rejo
		Gunung Rejo
		Karang Mulyo
		Sembowo

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan per tanggal 31 Desember 2020 Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai
per 31 Desember 2020

No	Instansi	Unit Kerja Perangkat Daerah	JML PNS
1	Sekretariat Daerah	-	122
2	Sekretariat DPRD	-	34
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	-	42
4	Inspektorat	-	36
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	20
6	Badan Pendapatan Daerah	-	24
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	29
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	28
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	20
10	BPBD	-	12
11	Dinas Pendidikan	50	4.030
12	Dinas Kesehatan	24	752
13	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	-	49
14	Dinas Perikanan	-	28
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	30
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	69
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	24
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	-	68
19	Dinas Pangan	-	19

No	Instansi	Unit Kerja Perangkat Daerah	JML PNS
20	Dinas Pertanian	-	114
21	Dinas Perhubungan	-	45
22	Dinas Perpustakaan	-	28
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	23
24	Dinas Sosial	-	30
25	RSUD	-	323
26	Satpol PP	-	50
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	69
28	Dinas PPKB dan PPPA	-	23
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	30
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan	-	29
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	30
32	Kecamatan	-	247
33	Kelurahan	-	30
JUMLAH		74	6.507

Sesuai dengan data dinding pegawai Kabupaten Pacitan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 jumlah keseluruhan pegawai sejumlah 6.507 orang, tersebar disemua Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung dan pelaksanaan urusan pemerintah yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 secara lengkap sebagai berikut :

Tabel. 1.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Capaian (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.618.552.237.78 2,20	1.624.631.028.78 9,38	100.38
A 1	Pendapatan Asli Daerah	153.458.081.130, 20	168.459.638.378, 38	109.78
-	Hasil Pajak Daerah	31.277.490.382,0 0	35.062.233.638,1 6	112.10
-	Hasil Retribusi Daerah	20.288.437.171,0 0	18.994.470.321,0 0	93.62
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102.68
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.292.153.577,2 0	111.733.381.357, 02	112.53

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Capaian (%)
A 2	Dana Perimbangan	1.125.168.863.99 0,00	1.106.069.120.35 0,00	98.30
-	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.677.414.442,0 0	82.626.327.469,0 0	101.16
-	Dana Alokasi Umum	748.480.938.000, 00	739.879.366.000, 00	98.85
-	Dana Alokasi Khusus	295.010.511.548, 00	283.563.426.881, 00	96.12
A 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	339.925.292.662, 00	350.102.270.061, 00	102.99
-	Pendapatan Hibah	57.662.240.000,0 0	58.554.240.000,0 0	101.55
-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.944.274.662,0 0	75.229.252.061,0 0	114.08
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	202.349.929.000, 00	202.349.929.000, 00	100.00
-	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	13.968.849.000,0 0	13.968.849.000,0 0	100
B	BELANJA DAERAH	1.659.176.387.13 6,94	1.570.270.990.46 0,45	94.64
B 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.120.793.448.29 0,81	1.080.929.046.60 5,56	96.44
-	BELANJA PEGAWAI	640.044.604.708, 30	624.056.147.994, 00	97.50
-	BELANJA HIBAH	98.687.874.355,0 0	87.702.988.960,0 0	88.87
-	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.199.100.000,0 0	10.749.680.534,0 0	95.99
-	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.953.587.004,00	5.168.064.575,00	86.81
-	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	324.968.550.299, 56	324.351.550.299, 56	99.81
-	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.939.731.923,9 5	28.900.614.243,0 0	72.36
B 2	BELANJA LANGSUNG	538.382.938.846, 13	489.341.943.854, 89	90.89

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Capaian (%)
-	BELANJA PEGAWAI	29.936.928.902,0 0	28.924.311.643,4 0	96.62
-	BELANJA BARANG DAN JASA	353.222.763.477, 02	320.359.144.542, 49	90.70
-	BELANJA MODAL	155.223.246.467, 11	140.058.487.669, 00	90.23
	JUMLAH BELANJA	1.659.176.387.13 6,94	1.570.270.990.46 0,45	94.64
	SURPLUS/(DEFISIT)	- 40.624.149.354,7 4	54.360.038.328,9 3	
C	PEMBIAYAAN DAERAH	40.624.149.354,7 4	42.191.996.500,7 4	103.86
-	Penerimaan Pembiayaan Daerah	42.074.149.354,7 4	42.191.996.500,7 4	100.28
-	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	0	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.624.149.354,7 4	42.191.996.500,7 4	103,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	96.552.034.829,6 7	

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

- % : Realisasi terhadap Pendapatan dan belanja Daerah

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan, antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan yang ditandai dengan masih sedikitnya jumlah sekolah SSN, yaitu pada tingkat SD 24 lembaga atau 5,7%, tingkat SMP 24 lembaga atau 34,78%, tingkat SMU 6 lembaga atau 50% dan pada tingkat SMK 1 lembaga atau 8,33%.

Selain dari masih sedikitnya jumlah sekolah yang berstandar nasional, Kabupaten Pacitan juga menduduki peringkat yang rendah untuk hasil ujian nasional tahun ajaran 2009/2010 dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Peringkat hasil ujian nasional untuk tingkat SD/MI Kabupaten Pacitan menduduki peringkat 32 dari 38 kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, untuk tingkat SMP menduduki peringkat 37, untuk tingkat SMU (IPA) menduduki peringkat 36, untuk tingkat SMU (IPS) menduduki peringkat 37, sedangkan untuk tingkat SMK menduduki peringkat 34.

2. Rendahnya akses pendidikan

Angka partisipasi kasar pada semua tingkat pendidikan menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada tingkat SD/MI yang berjumlah 103,10%. Dari semua tingkat pendidikan, yang memiliki capaian rendah yaitu pada tingkat PAUD yang baru mencapai 41,18%. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs sudah mencapai jumlah 97% dan SMU/SMK/MA berjumlah 67,15%.

3. Kurangnya sarana prasarana pelayanan medis

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Di Kabupaten Pacitan sarana prasarana pelayanan medis masih kurang yaitu ditandai dengan hanya tersedianya satu unit Rumah Sakit (RS) untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Selain itu masih banyaknya pasien

golongan menengah ke atas yang lebih percaya pada rumah sakit di kabupaten/kota tetangga untuk berobat, merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Pacitan untuk menyediakan kualitas pelayanan yang maksimal sehingga seluruh lapisan golongan masyarakat dapat terlayani kesehatannya di Kabupaten Pacitan.

4. Banyaknya kondisi jalan yang rusak

Prasarana Transportasi adalah salah satu prasarana yang sangat penting dan vital untuk mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi Kabupaten Pacitan yang berbukit dan bergunung menyebabkan pembangunan sarana perhubungan seperti jalan dan jembatan banyak mengalami kendala. Sehingga hal ini mengakibatkan pertumbuhan daerah-daerah pinggiran dan pelosok pedesaan Kabupaten Pacitan lambat berkembang. Kondisi prasarana infrastruktur Kabupaten Pacitan saat ini masih belum memadai ditandai dengan banyaknya jalan yang berlubang dan rusak yang mengindikasikan betapa belum maksimalnya pelayanan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan, dengan kondisi jalan aspal yang rusak pada tahun 2010 sebesar 23,33 % dan kondisi rusak berat berjumlah 16,17 %.

5. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan sanitasi dan kesehatan lingkungan

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap kesehatan dasar masih rendah, hal ini ditandai dengan masih adanya rumah yang belum memiliki jamban sendiri berjumlah 22,93% dan rumah yang belum memiliki sanitasi berjumlah 23,44%. Selain itu secara umum cakupan layanan kebersihan di Kabupaten Pacitan mengalami kondisi yang kurang maksimal hal ini disebabkan perkembangan volume sampah di Kabupaten Pacitan yang sangat pesat sehingga perkembangan infrastruktur persampahan tidak dapat memenuhi.

6. Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belum optimalnya peningkatan PAD ditandai dengan pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan masih mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, diharapkan ke depan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

➤ **Visi Dan Misi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995 Kabupaten Pacitan mempunyai semboyan "**TATA PRAMANA HARGENG PRAJA**" yang mengandung makna tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur Tata Tentrem Kerto Raharjo dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan semboyan Kabupaten Pacitan tersebut di atas Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi permasalahan, tantangan dan peluang dalam

pembangunan daerah serta mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemelihan umum kepala daerah, maka visi Kabupaten Pacitan periode 2016 – 2021 adalah

- **VISI**

Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016 - 2021 adalah “ **MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT** ”

Apabila dijabarkan Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

“ **MAJU** ” adalah memiliki makna bahwapembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

“ **SEJAHTERA** ” adalah mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

- **MISI**

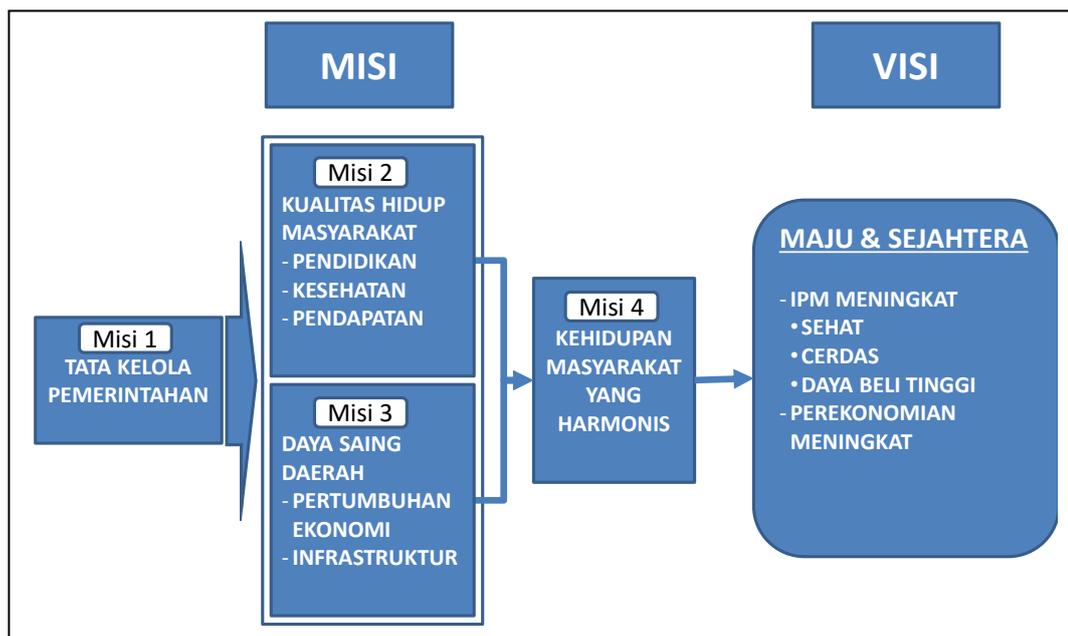
Misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;

2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian visi melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016 - 2021 disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021



... maju dan sejahtera bersama rakyat terkait pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu sebagaimana misi pertama. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama kemampuan Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten

Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM yang profesional, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mendukung misi kedua untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung kualitas hidup masyarakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih dipacu selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui program-program pembangunan bidang ekonomi dengan menggerakkan potensi daerah terutama pariwisata, pertanian (agropolitan) dan kelautan (minapolitan) yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Ketiga misi tersebut akan dapat berjalan dan diwujudkan apabila kondisi masyarakatnya kondusif dan harmonis, sebagaimana harapan misi keempat yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” 5 (lima) tahun

kedepan akan tercapai dengan indikator masyarakat Pacitan makin sehat, makin cerdas dan daya belinya tinggi atau dengan kata lain indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan meningkat serta perekonomian Kabupaten Pacitan juga meningkat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan “**MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT**”.

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016-2021 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain.

Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu:

MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

1. Birokrasi Profesional dan Berkarakter, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
3. Predator (Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor) dan Silades (Sidang Langsung di Desa), melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Pelayanan Publik Prima Berbasis IT (Pacitan e-gov), melalui Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
6. Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana, melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

1. Padu PAUD (Pacitan Peduli PAUD), melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pacitan Cendekia, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

3. Guru CAKEP (Cakap, Kompetitif, Edukatif Dan Profesional), melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan, melalui :
 - a. Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah raga
 - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP), melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
6. Kampung ASI, melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
7. GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak), melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
8. SANTUN MAPAN (Sanitasi Total Untuk Masyarakat Pacitan), melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
9. Ketahanan Keluarga Berbasis Posdaya, melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Secara Mandiri.
10. GRINDULU MAPAN (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan), melalui program-program pembangunan yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
11. Peningkatan Rehabilitasi Sosial, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

MISI 3: MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI

1. Rumah Pangan Lestari, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

2. Pacitan Bebas Rawan Pangan, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian.
4. Bangga Beternak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Sejahtera Bersama Usaha Mikro dan Koperasi, melalui Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Revitalisasi Pasar Daerah/Tradisional, melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa.
7. Industri berdaya saing, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
8. Ayo Wisata Ke Pacitan, melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
9. Transportasi MAPAN (Mantap, Aman dan Nyaman), melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
10. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdaya Guna, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
11. Pacitan Bebas Kawasan Kumuh, melalui Program Pengembangan Perumahan.
12. Air Bersih untuk rakyat, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum.
13. Pacitan BERSERI (Bersih, Sehat dan Lestari), melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

MISI 4: MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

1. Pacitan Rukun Damai (pemantapan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama), melalui Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
2. Pacitan Adem Ayem (peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat), melalui Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3. Pacitan Berubah (revolusi mental dan penguatan jati diri masyarakat berbasis kearifan lokal), penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia, pelestarian seni budaya tradisional dan jati diri masyarakat Pacitan, melalui Program Pengembangan Nilai Budaya.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen perencanaan Tahunan

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dengan dokumen perencanaan tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.7

Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2020

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD
			Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)
			Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Dasar SMP
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN
			Dasar
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK)
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembangunan Gedung Kantor
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota
			Penyediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan
			Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar
			Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi dan Pendukungnya
			Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi
			Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
	Kesehatan	RSUD	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Kab/Kota
			Pembangunan Gedung

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN
			Rawat Inap
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Kantor
			Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi
			Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
			Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
			Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
			Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah
			Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi
			Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman & Pertanahan	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK)
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan
			Pembangunan Jalan Lingkungan
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata
5	Pangan	Dinas Pangan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
6	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan	Penataan Daya Tarik Wisata (DAK)

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN
		dan Olah raga	
			Penataan Daya Tarik Wisata (DAK)
9	Pertanian	Dinas Pertanian	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pertanian
			Pengembangan Alat Mesin Pertanian
			Pengembangan Pupuk, Pemupukan dan Pestisida

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 dilihat dengan perencanaan pembangunan yang memprioritaskan penanganan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Permedagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah.
5. Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / 1089 / KPTS / 408.12/2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro adalah gambaran secara umum keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro pemerintah daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1

Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2019 - 2020

NO	URAIAN	TAHUN	
		2019*	2020**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,16	68,39
2	Angka Kemiskinan (%)	13,67	14,54
3	Angka Pengangguran (%)	0,95	2,28
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08	-1,84
5	Pendapatan per kapita (rupiah)	28.477.000	28.477.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,34	0,34

*Ket : * angka perbaikan*

*** angka sementara*

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 Mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Angka Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan mencapai - 1,84 % sedangkan tahun 2019 mencapai 5,08%.

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 sebesar 68,30 mengalami kenaikan sebesar 0,23 dibanding dengan capaian tahun 2019 sebesar 68,18. Angka Kemiskinan dengan kondisi tahun 2019 sejumlah 13,67 % dari total jumlah penduduk dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 14,54 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,87 %. Kenaikan tersebut diakibatkan karena adanya pandemi covid 19 yang membuat perekonomian nasional merosot tajam.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2019 mencapai 0,95% dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 2,28 %. Kenaikan tersebut diakibatkan karena pandemi covid 19 yang membuat banyak PHK dan pengangguran.

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun Rp. 27.076.000 pada tahun 2019 Sedangkan pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Sedangkan ketimpangan pendapatan (gini ratio) pada tahun 2020 sebesar 0,34 % sama seperti tahun 2020 sebesar 0,34 %.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan tujuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya tugas pembantuan dan pemberian otonomi secara luas. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas -luasnya. Pemberian otonomi secara luas serta adanya tugas pembantuan, memberikan konsekuensi bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPD) kepada masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/ kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing - masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Adapun dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, secara teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, format laporan Kepala Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebanyak 18, Urusan Pilihan sebanyak 6 dan Urusan Penunjang Pemerintahan sebanyak 5.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci keluaran setiap urusan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat Capaian Kinerja Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) sebanyak		889,00	Dinas Pendidikan
			2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak.....		0,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak..... -	-	0,00	Dinas Pendidikan
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak -	-	1778,00	Dinas Pendidikan
			5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak -	-	2193,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebanyak ...	-	1430,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah sebanyak ...	-	195,00	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi sebanyak ...	-	488,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak ... -	-	288,00	Dinas Pendidikan
			10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak ... -	-	284,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak -	-	35062,00	Dinas Pendidikan
			12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak -	-	14046,00	Dinas Pendidikan
			13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak	-	3728,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
						
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak	-	1112,00	Dinas Pendidikan
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak	-	4011,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak	-	1322,00	Dinas Pendidikan
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak	-	836,00	Dinas Pendidikan
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak	-	213,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak	554,00	Dinas Pendidikan	
			20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak	399,00	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja		Sumber Data	
			21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak	1800,00	Dinas Pendidikan
			22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak	781,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak		418,00	Dinas Pendidikan
			24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak		70,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak	-	454,00	Dinas Pendidikan
			26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak	-		Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi sebanyak ... -	488,00	Dinas Pendidikan
			28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak -	288,00	Dinas Pendidikan
			29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak -	284,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak	35061,00	Dinas Pendidikan	
			31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak	14046,00	Dinas Pendidikan	
			32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak	3728,00	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				-	-		
		33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak		1112,00	Dinas Pendidikan
		34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak		4011,00	Dinas Pendidikan
		35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak		1322,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar sebanyak	836,00	Dinas Pendidikan
			37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak	213,00	Dinas Pendidikan
			38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar sebanyak	554,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak	399,00	Dinas Pendidikan
			40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak	1800,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja		Sumber Data
		41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak	781,00	Dinas Pendidikan
		42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak	418,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja		Sumber Data	
		43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak	-	70,00	Dinas Pendidikan
		44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak	-	454,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak			Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) sebanyak	-	19,00	Dinas Pendidikan
			47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	0,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					sebanyak			
			48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak	2208,00		Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak		418,00	Dinas Pendidikan
			50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak		37,00	Dinas Pendidikan
			51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		37,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					sebanyak			
			52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak	-	418,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sebanyak	-	19,00	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	54	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar sebanyak	-	3,00	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	55	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya sebanyak	-	0,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	56	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p>-</p> <p>Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak</p> <p>Dukungan Logistik seperti :</p> <p>1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td)</p> <p>2 . Tablet Tambah Darah</p> <p>3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin</p> <p>4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu</p> <p>5 . Buku KIA , dll</p>	-	540597947,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			57	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sebanyak	257,00	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	58	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Formulir Photograf 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3 . Buku KIA , dll	2447008700,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			59	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar sebanyak	-	257,00	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		60	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Hepatitis BO 2 . Vitamin K1 Injeksi 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik 4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM 6 . Buku KIA , dll	-	1899930976,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			61	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar sebanyak	-	257,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	62	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah	-	1899930976,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT - HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll	-	-		
			63	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebanyak	-	342,00	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		64	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	-	656575396,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		sesuai standar			Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Raport Kesehatanku 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			65	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar sebanyak	-	342,00	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	-	1050276293,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , DII	-	-	
			67	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak	414,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti :	365062360,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia , DII	-			
			69	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak		414,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p>Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak</p> <p>Dukungan Logistik seperti :</p> <p>1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE</p> <p>2 . Tensimeter</p> <p>3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM , DII</p>	-	227301350,00	
			71	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak	-	414,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p>Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak</p> <p>Dukungan Logistik seperti :</p> <p>1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet</p> <p>2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM</p> <p>3 . Pedoman dan Media KIE , DII</p>	-	251601350,00	
			73	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak	-	168,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					-	-		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	74	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p>Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak</p> <p>Dukungan Logistik seperti :</p> <p>1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia</p> <p>2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi</p> <p>3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>4 . Media KIE , DII</p>		646656075,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					-	-		
			75	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak		144,00	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	76	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2 . Reagen Zn TB 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		0,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , Dll	-	-	
			77	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak	414,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	78	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p>Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak</p> <p>Dukungan Logistik seperti :</p> <p>1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner</p> <p>2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama</p> <p>3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK</p>		540597947,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					4 . Lainnya...			
			79	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		414,00	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	80	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		1018,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			81	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) -			
			82	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) -			
			83	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan		1,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				kabupaten/kota (m)	-	-		
			84	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	1,00	
			85	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	60,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					-	-		
			86	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	<p>Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) 		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota			-	-		
			87	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		1018,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		88	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	6252,30		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			89	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) -	-	450,00	
			90	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) -	-	4500,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			91	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		1,00	
			92	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	-	-		
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93	1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi primer (m) -	174629,00 542537,00	32,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data			
			94	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1507 416 1715 531">29311,00</td> <td data-bbox="1715 416 1933 767" rowspan="2">23,72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1507 531 1715 767">123564,00</td> </tr> </table>	29311,00	23,72	123564,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29311,00	23,72									
123564,00										
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	95	1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Adanya dokumen RISPAM kabupaten/kota	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			96	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			97	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM -	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			98	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM sebanyak -	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			99	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain sebanyak -	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS sebanyak		157629,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			101	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T sebanyak		157629,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			102	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T sebanyak	157629,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			103	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja sebanyak	1326,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		104	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja sebanyak		1326,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		105	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik sebanyak		78899,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		106	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akases dasar	Σ Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	<p style="text-align: right;">78899,00</p> <p style="text-align: right;">168424,00</p>	46,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>Σ Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha</p> <p>-</p>			
			107	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	<p>Σ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT</p> <p>Σ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha</p> <p>-</p>		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		108	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	<p>Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD T</p> <p>-</p>	<p>0,00</p> <p>1200,00</p>	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		109	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	<p>Σ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat</p> <p>Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S</p> <p>-</p>	<p>684,00</p> <p>1200,00</p>	57,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data			
			110	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Σ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia Σ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota -	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1507 416 1715 517">0,00</td> <td data-bbox="1715 416 1933 517" rowspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1507 517 1715 788">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0,00	0,00									
0,00										
			111	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Σ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia Σ Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota -	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1507 1161 1715 1262">0,00</td> <td data-bbox="1715 1161 1933 1262" rowspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1507 1262 1715 1161">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0,00	0,00									
0,00										

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			112	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	<p>Σ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD</p> <p>Σ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota</p> <p>-</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			113	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	<p>Σ Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot</p> <p>Σ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S</p> <p>-</p>	<p>10,00</p> <p>1326,00</p>	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	114	1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	<p>Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku</p> <p>Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		115	2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	<p>Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting sebanyak</p>		162,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			116	3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			117	4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			118	5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan sebanyak	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			119	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	- Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi sebanyak	- 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			120	7. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota	- Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota sebanyak	- 53,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			121	8. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	- Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat sebanyak	- 8,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
					-	-	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	122	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota M	798000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			123	2. Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangunm	2000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			124	3. Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangunm	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			125	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)m -	31153,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			126	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkanm -	15,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			127	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasim -	31153,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			128	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasim -	30,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			129	8. Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipeliharam	5500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			130	9. Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipeliharam	20,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		131	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota sebanyak	64,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			132	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota sebanyak	64,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			133	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota sebanyak	64,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			134	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			135	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			136	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			137	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			138	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			139	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			140	<p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p>	<p>Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p>		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			141	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			142	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah kab/kota	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah kab/kota	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			143	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			144	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			145	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			146	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			147	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			148	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota sebanyak		74,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		149	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota sebanyak	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		150	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota sebanyak	-	45,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		151	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	15,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		152	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui sebanyak		45,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		153	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak		15,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		154	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		155	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak	-	15,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	156	-	-			
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	157	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya sebanyak			Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
158	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Jumlah rumah yang terkena bencana alam sebanyak	-	24,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan		
159	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam sebanyak	-	24,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		160	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi sebanyak	-	-	24,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		161	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi sebanyak	-	-	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		162	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	-	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				sebanyak				
			163	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana sebanyak	24,00		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			164	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi sebanyak	24,00		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			165	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan sebanyak		0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		166	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1159,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			167	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak	-	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			168	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak	-	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			169	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak		1159,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			170	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak		0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			171	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanahHa	3615,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	172	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 HaHa	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			173	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH sebanyak	1159,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			174	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuhHa	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					-	-	Pertanahan	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	175	Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah rumah di kab/kota sebanyak		14666,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			176	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH sebanyak		1159,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			177	Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak		416,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			178	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni sebanyak		112,00	Dinas Perumahan Rakyat,

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
					-	-	Permukiman dan Pertanahan
			179 Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- Jumlah total unit rumah		94,8%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			180 Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah rumah pembangunan baru sebanyak		342,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	181 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		146666,00	
			182 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan sebanyak		146666,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
							Pertanahan
		183	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) sebanyak	-	146666,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		184	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH sebanyak	-	13199940,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		185	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU sebanyak	-	58666,40	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			186	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi sebanyak	3,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			187	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah pengembang yang teregistrasi sebanyak	3,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			188	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan sebanyak	3,00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	189	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani sebanyak		0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			190	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak		200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			191	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak		9,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		192	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak	-	5,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		193	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	-	14,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		194	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)	-	167,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	195	-	-			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	196	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	597473,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			197	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	- 16033,00 597473,00	2,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	198	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</p>			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			199	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan</p>	<p>-</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			200	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	<p>jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana</p>	<p>-</p> <hr/> <p>35,00</p> <p>78527,00</p>	0,04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			201	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	<p>jumlah warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	<p>-</p> <hr/> <p>35,00</p> <p>78527,00</p>	0,04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			202	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<p>Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops</p> <p>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	<p>100,00</p> <hr/> <p>597473,00</p> <p>597473,00</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			203	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	<p>Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan</p> <p>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	<p>0,03</p> <hr/> <p>191,00</p> <p>597473,00</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	204	1.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB	2,00 2,00 -	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			205	2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	3,00 3,00 -	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			206	3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	<div style="text-align: right;">44,64</div> <hr/> <div style="text-align: right;">25,00</div> <div style="text-align: right;">56,00</div>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			207	4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	<div style="text-align: right;">100,00</div> <hr/> <div style="text-align: right;">113,00</div> <div style="text-align: right;">113,00</div>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	208	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota		81,82	Satuan Polisi Pamong Praja
			209	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Ada	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			210	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Ada	Satuan Polisi Pamong Praja
			211	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa (Dibuat dalam bentuk daftar)		2,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			212	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi sebanyak(Dibuat dalam bentuk daftar)		101,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			213	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak		28,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		214	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebanyak		0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		215	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran sebanyak(kegiatan/pelatihan)			Satuan Polisi Pamong Praja
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	216	-	-			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	217	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki sebanyak			Dinas Sosial
			218	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM sebanyak	-	2576,00	Dinas Sosial
			219	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk sebanyak	-	0,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			220	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau sebanyak	- -		Dinas Sosial
			221	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	- Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki sebanyak	- 3,00	3,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			222	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi sebanyak			Dinas Sosial
			223	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar sebanyak	1,00		Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		224	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang sebanyak		0,00	Dinas Sosial
		225	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu sebanyak		20,00	Dinas Sosial
		226	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter sebanyak		0,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			227	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia sebanyak	-	0,00	Dinas Sosial
			228	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan sebanyak	-		Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		229	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah sebanyak	-	2,00	Dinas Sosial
		230	14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan sebanyak	-	208,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			231	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial sebanyak		370,00	Dinas Sosial
			232	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat sebanyak		32,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			233	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan sebanyak	- 8,00	Dinas Sosial
			234	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak	- 7,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			235	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga sebanyak -	-	143,00	Dinas Sosial
			236	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebanyak -	-	143,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			237	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk sebanyak	0,00	Dinas Sosial
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	238	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan sebanyak	250,00	Dinas Sosial
			239	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang sebanyak	100,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		240	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki sebanyak	-	0,00	Dinas Sosial
		241	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan sebanyak	-	356,00	Dinas Sosial
		242	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial sebanyak	-	250,00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			243	6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia sebanyak	-	208,00	Dinas Sosial
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	244	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota (Mengidentifikasi/me mbandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)	-	1,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			245	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	<p>Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%</p> <p>realisasi indikator - Target indikator</p> <p>Realisasi</p>			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			246	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	<p>Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota sebanyak</p>	-	1,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	247	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	<p>Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n</p> <p>Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n</p>	<p>80,00</p> <hr/> <p>8,00</p> <p>10,00</p>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			248	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	<p>Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n</p> <p>Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n</p>	<p>3,00</p> <hr/> <p>3,00</p>	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		249	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	<p>Jumlah instruktur pada tahun n</p> <p>Jumlah peserta pelatihan pada tahun n</p>	<p>3,00</p> <p>352,00</p>	0,85	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		250	4. Persentase LPK yang terakreditasi	<p>LPK yang terakreditasi pada tahun n</p> <p>Jumlah seluruh LPK pada tahun n</p>	<p>0,00</p> <p>4,00</p>	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		251	5. Persentase LPK yang memiliki	<p>Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n</p> <p>Jumlah LPK yang terdata pada tahun n</p>	<p>4,00</p> <p>4,00</p>	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		252	6. Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah Peserta Pelatihan pada tahun n...	-	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah penganggur pada tahun n ...	412,00		
					412,00		
		253	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	-	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah orang yang dilatih pada tahun n			
		254	8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	-	85,44	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					352,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				jumlah lulusan pada tahun n	-	412,00	
		255	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	-	63,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	-	63,00	
		256	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih	-	27,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah CPMI terdaftar	-	27,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			257	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	<p>Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ...</p> <p>Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n</p> <p>Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p>	<p>-</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>100,00</p> <p>1,72%</p>	<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p>
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		258	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	1,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				Jumlah perusahaan pada tahun n	58,00		
		259	Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	-	5.08 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	260	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n	54,00 44,00	122,73%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			261	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<p>Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n</p> <p>Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB</p>	<p>-</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p>	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			262	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan sebanyak	-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			263	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	<p>Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah...</p> <p>Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)</p>	<p>-</p> <p>24,00</p> <p>58,00</p>	41,38%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			264	5. PPersentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<p>Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</p>	<p>-</p> <p>31,00</p> <p>24,00</p>	129,17%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			265	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	<p>Jumlah perusahaan yang berselisih</p> <p>Jumlah perusahaan pada tahun n</p>	<p>-</p> <p>7,00</p> <p>58,00</p>	12,07%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			266	7. Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja sebanyak	-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			267	8. Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan sebanyak	-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			268	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan sebanyak	9,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			269	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan sebanyak	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			270	11. Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK sebanyak	1,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			271	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK sebanyak	1,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
							
			272	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite sebanyak	-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			273	14. Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	-	tidak ada	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			274	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah penjanjian bersama	9,00	100%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah kasus	9,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
					perselisihan		
					-	-	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	275	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota sebanyak		1742,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		276	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota sebanyak		1267,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		277	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota sebanyak		20,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			278	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota sebanyak	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			279	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sebanyak	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			280	6. Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota sebanyak	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				-	-		
		281	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota sebanyak		27,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		282	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER) sebanyak		352,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		283	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi		100%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah CPMI/CTKI	360,00 360,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			284	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak	-	27,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			285	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan	-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah PMI yang pulang	0,00 55,00	0,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			286	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	<p>Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>Jumlah PMI/TKI</p>	<p>-</p> <p>27,00</p>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			287	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	<p>Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan</p> <p>Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya</p>	<p>-</p> <p>27,00</p>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			288	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang	<p>Jumlah LTSA yang terbentuk</p>	<p>1,00</p> <p>14,29</p>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
				dibentukan	Jumlah daerah kantong PMI/TKI		7,00	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	289	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG sebanyak	-	43,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			290	2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota sebanyak	-	43,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	291	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak sebanyak	-	4,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			292	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal sebanyak	-	13,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			293	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	12,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota	-	12,00	Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
			294	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	-	13,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			295	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	-	2,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	296	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan sebanyak	-	4,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			297	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih sebanyak	-	2,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			298	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan sebanyak		1,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			299	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota sebanyak		2,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		300	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi sebanyak		3,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		301	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi sebanyak		1,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		302	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan	21,00	100%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					layanan			Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	21,00		
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	303	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	ada	Dinas Pangan
			304	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	ada	Dinas Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			305	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	- Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	- tidak	Dinas Pangan
			306	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	- ada	Dinas Pangan
			307	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	- Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	- ada	Dinas Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			308	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan		ada	Dinas Pangan
			309	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		ada	Dinas Pangan
			310	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		ada	Dinas Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja		Sumber Data	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	311	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	<p>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</p> <p>Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</p> <p>-</p>		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
312	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		<p>Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee</p> <p>Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform</p>				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			313	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	<p>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee</p> <p>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek</p>	-		
			314	4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>-----</p> <p>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</p> <p>-</p>	-		
			315	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<p>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</p> <p>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</p> <p>-</p>	-		
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	316	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA)	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA)	a. IKA = 48.86 b. IKU = 73.13		Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
				b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan hutan (ITH)	b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan hutan (ITH)			
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	317		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		1. 51.5%, 2. Dokumen PTMP 2018	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	318	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	163,00 167,00	97,60	Dinas Lingkungan Hidup
			319	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		320	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui Jumlah usulan MHA -			Dinas Lingkungan Hidup
		321	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan Jumlah MHA yang ada -			Dinas Lingkungan Hidup
		322	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat			Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			323	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	- pengaduan masyarakat yang ditangani	-	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
					Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	12,00 12,00		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	Perekaman KTP Elektronik	324	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	- 2,00	99,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
	PENCATATAN SIPIL			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	-	2,00	Sipil	
			325	2. Penerbitan akta perceraian	-	2,00 2,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			326	3. Penerbitan akta kematian	-	18334,00 21957,00	83,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			327	4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun 2 (kali)	- 15,00 30,00	50,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	328	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa sebanyak	-	5,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			329	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	-	15,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					sebanyak			
			330	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak	-	131,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			331	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan sebanyak		71,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	332	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa sebanyak		5,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			333	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya sebanyak		24,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			334	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak		131,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			335	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan sebanyak		71,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	336	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	Dokumen GDPK tersedia tetapi belum di-Perdakan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			337	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.		22,75	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			338	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		34,62	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			339	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	<p>Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)</p> <p>Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)</p>	<p>246167,00</p> <p>586110,00</p>	42,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			340	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	<p>Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK sebanyak</p>	-	2280,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	341	1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah faskes	29,00 29,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			342	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif Jumlah pasangan usia subur	38264,00 116558,00	32,83	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			343	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif sebanyak	-	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			344	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	<p>Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern</p> <p>Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan</p> <p>KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari</p>	<p>1328,00</p> <p>8781,00</p>	15,12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	345	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		7,02	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			346	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI Jumlah keluarga PBI	- 912,00 111689	0,82%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.			
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	347	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	<p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan</p>	<p>-</p> <hr/> <p>23,00</p> <p>35,00</p>	7500%	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			348	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	<p>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</p> <p>Jumlah kendaraan wajib uji</p>	<p>-</p> <p>3741,00</p> <p>4984,00</p>	75%	Dinas Perhubungan
			349	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	<p>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</p> <p>Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota</p>	<p>-</p> <p>-</p>		Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			350	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	2289,00 25915,00	100,00	Dinas Perhubungan
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	351	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota	35,00 35,00	100,00	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	352	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<p style="text-align: right;">14,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">43,00</p>	32,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah Perangkat Daerah	-		
			353	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<p style="text-align: right;">14,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">43,00</p>	32,56	
					Jumlah Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			354	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	-	ada	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	355	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	<p>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</p> <p>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</p>	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			356	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Jumlah Perangkat Daerah	<div style="text-align: right;">43,00</div> <hr/> <div style="text-align: right;">43,00</div>	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			357	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah Perangkat Daerah	<div style="text-align: right;">31,00</div> <hr/> <div style="text-align: right;">43,00</div>	72,09	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			358	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<p>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>Jumlah Layanan</p>	<p>-</p> <hr/> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			359	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<p>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>Jumlah layanan</p>	<p>-</p> <hr/> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			360	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>-----</p> <p>Jumlah sistem elektronik</p>	<p>-</p> <p>14,00</p> <p>14,00</p>	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			361	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<p>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>layanan publik dan layanan administrasi</p>	-		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			362	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> <p>Jumlah perangkat daerah</p>	<p>-</p> <p>40,00</p> <p>43,00</p>	93,02	Dinas Komunikasi dan Informatika
			363	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	<p>Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</p> <p>Jumlah perangkat daerah</p>	<p>-</p> <p>40,00</p> <p>43,00</p>	93,02	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			364	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya Jumlah perangkat daerah -	100,00 43,00 43,00 -	Dinas Komunikasi dan Informatika
			365	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah -	43,00 43,00 -	100% Dinas Komunikasi dan Informatika
			366	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city -	0,00 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				Jumlah perangkat daerah	-	43,00		
		367	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	2,00 25,00	8,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		368	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:	-		Dokumen Master Plan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					§ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota	5,00 60,00	8,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
			370	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	1829,00	100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota	-	1829,00		
		371	3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	300,00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	-	300,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	372	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	240,00 281,00	97,86	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			-	-				
			373	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0,00 0,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			-	-				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			374	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</p> <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	<p>-</p> <p>230,00</p> <p>556,00</p>	41,37	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			375	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</p> <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</p>	<p>-</p> <p>5,00</p> <p>556,00</p>	0,90	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			376	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada -	18,88 105,00 556,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			377	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada -	46,76 260,00 556,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			378	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan -	0,00 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada	556,00	
					Jumlah koperasi yang ada	-	
		379	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)		
		380	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	223,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah koperasi yang ada	556,00	
					Jumlah koperasi yang ada	-	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			381	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah koperasi yang ada -	9,00 556,00 -	1,62	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			382	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah koperasi yang ada -	6,00 556,00 -	1,08	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		383	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	885,00 3905,00	22,66	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				Jumlah wirausaha yang ada	-		
		384	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	0,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah usaha mikro yang ada	23170,00		
		385	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra	20,00	0,09	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Jumlah usaha mikro yang ada	23170,00		
					-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			386	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<p>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</p> <p>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</p>	<p>651,00</p> <p>23170,00</p>	2,81	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			387	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<p>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</p> <p>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</p>	<p>120,00</p> <p>23170,00</p>	0,52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			388	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<p>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</p> <p>Jumlah usaha mikro yang ada</p>	<p>-</p> <p>410,00</p> <p>23170,00</p>	1,77	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			389	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	<p>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</p> <p>Jumlah usaha mikro yang ada</p>	<p>-</p> <p>850,00</p> <p>23170,00</p>	3,67	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	390	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak		4 (empat)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			391	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			392	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				pertahun sebanyak			
		393	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting sebanyak	-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		394	5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal sebanyak	-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		395	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal sebanyak		0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		396	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebanyak		1048,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		397	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan sebanyak		2624,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		398	9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak	-	416.329.330.025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		399	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak	-	11,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		400	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak	-	24 investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
			401	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak	-	9,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	402	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	40,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			403	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Peningkatan prestasi olahraga	404	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga		471,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			405	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		2,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					sebanyak			
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	406	1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	-	ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan sebanyak	-	Survey Inflasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		
408	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan sebanyak	-	2 dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			409	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	<p>Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS sebanyak</p> <p>-</p>	-	Survey Inflasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			410	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	<p>Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS sebanyak</p> <p>-</p>	-	Survey sosial Survey ekonomi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			411	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	<p>Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral</p> <p>Jumlah kegiatan statistik sektoral</p>	<p>-</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			412	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral	1,00	100%	
					Jumlah indikator statistik sektoral	1,00		
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	413	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	1,00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah kegiatan strategis yang ada	1,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					<p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			414	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</p> <p>Jumlah SE yang ada</p> <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem</p>	<p>43,00</p> <p>43,00</p>	<p>100%</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					<p>keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan,</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.</p> <p>Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			415	3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<p>Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> <p>Jumlah SE yang ada</p> <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan</p>	<p>-</p> <p>0,00</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			416	4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik	<p>Jumlah titik teramankan</p>	<p>-</p> <p>3,00</p> <p>4,00</p>	75,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja		Sumber Data	
			<p>pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</p>	<p>Jumlah titik pada PHKS</p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi			
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	417	1.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak		11,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			418	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak		Dinas Pendidikan
			419	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak		Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			420	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	-	-	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			421	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak			Dinas Pendidikan
			422	6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak	-	1141,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			423	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak		Dinas Pendidikan
			424	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak		Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			425	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak			Dinas Pendidikan
			426	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak	-	1127,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			427	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak		1873,00	Dinas Pendidikan
			428	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya kabupaten/kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak			Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			429	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak			Dinas Pendidikan
			430	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak			Dinas Pendidikan
			431	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum sebanyak	18,00		Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			432	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak			Dinas Pendidikan
			433	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak			Dinas Pendidikan
			434	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak		2,00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	435	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	32538,00 556419,00	5,85	Dinas Perpustakaan
			436	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site Jumlah penduduk di wilayahnya	137789,00 556419,00	24,76	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data			
			437	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1507 416 1713 555">847,00</td> <td data-bbox="1713 416 1933 1200" rowspan="2">0,15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1507 555 1713 815">556419,00</td> </tr> </table>	847,00	0,15	556419,00	Dinas Perpustakaan
847,00	0,15									
556419,00										
			438	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpusatakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1507 1200 1713 1294">103,00</td> <td data-bbox="1713 1200 1933 1200" rowspan="2">12,38</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1507 1294 1713 1200">832,00</td> </tr> </table>	103,00	12,38	832,00	Dinas Perpustakaan
103,00	12,38									
832,00										

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.				
			439	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	4,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	440	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-	4,00	Dinas Perpustakaan
			441	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa sebanyak (Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan	-	0,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					ilmu pengetahuan)			
			442	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak	-	4,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	-		
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	443	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan	0,00 <hr/> 8,00		Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		Kearsipan			kab/kota Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN			
			444	2. Persentase arsip in-aktif	-	5183,00	96,57	Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				yang telah dibuatkan daftar arsip		5367,00		Perpustakaan
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	445	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		0,00	Dinas Perpustakaan
			446	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		1,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			447	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	-		Dinas Perpustakaan
			448	4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	-	1,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			449	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	- NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	-		Dinas Perpustakaan
			450	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	- NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	-	3,00	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	451	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) sebanyak	-	2275,00	Dinas Perikanan
452			2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	-	6,00	100,00	Dinas Perikanan
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab/kota	-	6,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
			453	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	28,00	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					-	-		
			454	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun sebanyak	82,00	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				penguatan kelembagaan	-	-		
			455	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak	-	1.766.484	Dinas Perikanan
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	456	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak	-	19,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<p>Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan</p> <p>Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			457	2.Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	<p>Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 		1234,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			458	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	<p>-</p> <p>Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak</p> <p>o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 	-	1337,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa 			
			459	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		105,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		460	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri dilakukan sebanyak (Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)		5,00	
		461	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota sebanyak.....(Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)		0,00	
		462	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak		76,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				<p>Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.</p>				
			463	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<p>Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi</p> <p>Jumlah tenaga kerja pariwisata</p>	-	69,56	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
				Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi			
		464	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	360,00 6,00	6000%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
			465	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat sebanyak	19,00	19,00	
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	466	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak	5930,00		
			467	2. Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak	845,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			468	3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak	86,00		
			469	4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	845,00	37%	
				Jumlah prasarana yang dibangun	2265,00			
			470	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	86,00	98%	
				Jumlah usulan usaha pertanian	88,00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					-	-		
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	471	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	17,00	45%	
					Luas area terkena bencana	38,00		
					Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular			
28	KEHUTANAN	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	472	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			473	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak			
			474	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiha			
			475	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	476	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota sebanyak -	-	
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	477	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	-	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		478	2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja Jumlah permohonan penerbitan TDG	5,00	100%	
		479	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG Jumlah gudang yang ada di kab/kota	5,00	4%	
		480	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :	0,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
				<p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	<p>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> <p>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri</p>	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			481	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer	3,00 3,00	100%	
			482	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			483	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	15,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
			484	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	belum ketemu		
		Persentase kinerja pupuk	485	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{(bxc)} \times 100$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	0.0037		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
					-	-		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	486	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	500,00	26%	
					Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab / Kota	1957,00		
					-	-		
			487	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	6,00	100%	
					Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	6,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
					-	-	
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	488	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0,00	
					-	-	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	489	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
					c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan	490	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data
		pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk -	-	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	491	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan -	0,00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	492	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	12,00 12069,00	0,10%	
32	TRANSMIGRASI	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	493	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	0,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja		Sumber Data	
			494	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	- Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	- 0,00		
			495	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	- Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak	- 0,00		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Indikator Kinerja Kunci Hasil merupakan capaian dari kinerja indikator kinerja keluaran yang menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten. Secara lengkap Indikator Kinerja Kunci Hasil sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat Capaian Kinerja Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1. URUSAN PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	11.068,00	85,49%	Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	12.946,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	43.911,00	99,99%	Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	43.915,00		
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	20.354,00	90,12%	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	22.585,00		
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2208	67,40%	Dinas Pendidikan
		jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	3276		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
2. URUSAN KESEHATAN					
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	317	0,0570	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk di Kabupaten	555984		
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	2	50	Dinas Kesehatan
		Jumlah RS di Kabupaten	4		
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.889,00	95,31	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
		3	4		
1	2	3	4	5	6
		Jumlah ibu hamil di Kabupaten	7.228,00		
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	6.551,00	94,94	Dinas Kesehatan
		jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	6.900,00		
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.530,00	99,38	Dinas Kesehatan
		Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	6.571,00		
10	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	23.261,00	88,63	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah balita di Kabupaten	26.246,00		
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	64.287,00	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	64.287,00		
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83.030,00	24,63	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	372.486,00		
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72.572,00	64,45	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	112.604,00		
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40.851,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	40.851,00		
15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.761,00	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita DM di Kabupaten	7.761,00		
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	910	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	910,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.900,00	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten	1.900,00		
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	6.437,00	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	6.437,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
19	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	785	77,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	1.018,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
20	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	50,00	11,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten	450,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	4.836,00	58,45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten	8.274,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	100.161,00	59,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.	168.424,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
23	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	157629	93,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah di kabupaten	168424		
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	73.518	74,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah IMB yang berlaku	98.310		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	532.938,00	66,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		panjang jalan keseluruhan diwilayah kab	798.000,00		
26	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	64	64,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	100		
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	194		
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	24	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	24		
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	1159	5,25%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	22066		
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	3,7	1,32%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	281,1		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	410	0,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah total unit rumah Kabupaten	146.666,00		
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun dan atau sudah terfasilitasi PSU	136.796,00	86,11%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah Kabupaten	158.862,00		
5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	11	100	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	diselesaikan				
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	11		
34	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9	9	Satuan Polisi Pamong Praja
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	555.300,00	555.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	597.473,00	597.473,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.835,00	0,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Keseluruhan Korban Bencana di Suatu Kab/Kabupaten	555.300,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
39	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadam di kab dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	18	81,82	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	22		
40	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	response time	15 Menit	15 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja
6. URUSAN SOSIAL					
41	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2.520,00	85,54	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	2.946,00		
42	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	250	53,53	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	467		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
7. URUSAN TENAGA KERJA					
43	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	6	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	6		
44	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	352	0,1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	352.913,00		
45	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	37	46,84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah tenaga kerja	79		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
46	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	37	46,84	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah Perusahaan	79		
47	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	816	64,4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah pencaker yang terdaftar	1.267,00		
8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
48	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	35.007.690.975	2,15%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD	1.626.626.218.615		Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
49	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	12	0,009%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	139.617,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
50	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	21	0,01	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		Jumlah penduduk perempuan	295.433,00		
9. URUSAN PANGAN					
51	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	210,7	208,90%	Dinas Pangan
		Jumlah kebutuhan pangan	100,86		
10. URUSAN PERTANAHAN					
52	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	409		Permukiman dan Pertanahan
53	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	42.143,00	148,51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	28.378,00		
54	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Luas izin lokasi yang diterbitkan	409		
55	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)	724.595,00	233.740,3 2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah penerima tanah obyek landreform	310		
56	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	0		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0		
57	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0		Dinas Perumahan, Kawasan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	mediasi				Permukiman dan Pertanahan
		jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			
11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,89	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Pencemaran Air		50,00	
		Indeks Kualitas Pencemaran Udara		91,89	
		Indeks Tutupan Hutan/Lahan		75,87	
59	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani	32.989,00	96,4	Dinas Lingkungan Hidup
		Total vol timbunan sampah Kabupaten	34.220,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
60	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	87		
12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
61	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	479.484,00	99,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	482.241,00		
62	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	42.162,00	35,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	117.146,00		
63	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	134.314,00	95,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	140.158,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
64	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	9	20,93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah OPD	43		
13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
65	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	6	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2020)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			6		
66	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	0,96%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2020)	104		
14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
67	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	1,89	1,89	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
					Anak
68	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	90.370,00	77,53%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		Jumlah Pasangan Usia Subur	116.558,00		
69	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10.101,00	8,67	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pasangan Usia Subur			Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			116.558,00		
15. PERHUBUNGAN					
14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)	0,7	0,7	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut			
		o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)			
		Keterangan: IK1 (Angkutan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jalan) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu 			
		IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu 			
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		<p>penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		jalan=50)			
		3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100)			
		Bobot trayek atau lintas:			
		a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1			
		b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5			
16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
71	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,2	0,2	Dinas Perhubungan
72	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	6	13,953%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah OPD	43		
73	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Layanan Publik	12		
74	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	284.900,00	48,61%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Penduduk	586.110,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
17. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
75	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	236	42,45%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah seluruh koperasi	556		
76	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	885	3,82	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	23.170,00		
18. PENANAMAN MODAL					
77	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun	- 14.836.648.228.149	-97,27	Dinas Penanaman Modal dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		2019) di Kabupaten			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah investasi tahun 2019 di Kabupaten	15.252.977.558.175,00		
19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	2.690,00	90,33	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten	2.978,00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
79	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	7530	6,06%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	124.251,00		
80	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	9	9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
20. STATISTIK					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
81	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	28	65,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah OPD	43		
82	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	30	69,77%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah OPD	43		
21. PERSANDIAN					
83	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	1	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah area penilaian	1		
22. KEBUDAYAAN					
84	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	1.141,00	96,21	Dinas Pendidikan
		Jumlah cagar budaya yang terdata	1.186,00		
23. PERPUSTAKAAN					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
85	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		55,03	Dinas Perpustakaan
86	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	0	0	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan			
		UPLM 2 = Ketercukupan koleksi			
		UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan			
		UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan			
		UPLM 5 = Perpustakaan ber- SNP			
		UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		UPLM 7 = Anggota perpustakaan			
24. KEARSIPAN					
87	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a+i+s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	74,14	74,14	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN			
88	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = \frac{(m+b+g+a+c+i)}{6}$ <p>T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p>	60,83	60,83	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		<p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p>			
		<p>g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah preovinsi yang digabung dan/atau dibuabrkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK</p>			
		<p>a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK			
		l= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
25. KELAUTAN DAN PERIKANAN					
89	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (Ton) (sumber data: one data KKP)	13.891,53	13.891,53	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
26. PARIWISATA					
90	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun 2019	-1.106,00	-91,33	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah wisatawan tahun 2019	1.211,00		
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun 2019)	-1.443.616,00	-62,66	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah wisatawan tahun 2019	2.303.908,00		
91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	16.854,00	610,06	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kamar yang tersedia			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			855		
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB (dalam satuan Rupiah) dari sektor Pariwisata	5.273.777.500,00	Infinity	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah total PDRB (dalam satuan Rupiah)			
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.278.178.000		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah total PAD			
27. PERTANIAN					
94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)	186.893,00	5,49	Dinas Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Luas panen (ha)	33.993,00		
95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan(Tahun 2020) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (Tahun 2019)	-45	-1,53%	Dinas Pertanian
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (Tahun 2019)	2932		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
28. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1		
29. PERDAGANGAN					
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	2.092,00	21,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	9.541,00		
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	27.644,88	96,31	Dinas Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		RDKK	28.703,00		dan Perdagangan
99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	500 500,00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30. PERINDUSTRIAN					
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2019)	-321	-2,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019	12.386,00		
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten	4	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional/Provinsi (10 Jenis)	4		
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	12	40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
		3	4		
1	2	3	4	5	6
			30		
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	12	40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah izin yang dikeluarkan	30		
104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah izin yang dikeluarkan	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri :	50	70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)					
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)					
- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)					
2) Kelengkapan informasi industri meliputi :					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	10		
		- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	10		
		Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)			

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan secara lengkap dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat Capaian Kinerja Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
PERENCANAAN KEUANGAN					
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	487.104.476.854,00	31,02%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah APBD	1.570.270.990.460,45		
2	Rasio PAD	Jumlah PAD	Rp 168.459.638.378	10,41%	Badan Pendapatan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah PDRB Non Migas	Rp 1.618.552.237.782		
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	Inspektorat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	2+	Inspektorat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures	499.182.236.264,00	31,79	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah belanja APBD	1.570.270.990.460,45		
6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
PENGADAAN					
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020	0	0	Sekretariat Daerah
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020	507		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	66	14,97%	Sekretariat Daerah
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	441		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Rp52.675.285.018	9,78%	Sekretariat Daerah
		Total belanja langsung	Rp538.382.938.846		
KEPEGAWAIAN					
10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	1021	83,96%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
		Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1.216,00		
11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	164	7,91%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
			2.073,00		
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	164	100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	164		
MANAJEMEN KEUANGAN					
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran)	Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi	1.570.270.990.460,45	91,49%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	belanja dari perencanaan awal)	Total Belanja APBD sebelum perubahan	1716284364158		
14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi	1.570.270.990.460,45	806,48%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Total PAD dalam APBD sebelum perubahan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		-	194.706.585.466,00		
15	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya Ya Ya Tidak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16	Rasio Anggaran	Nilai realisasi	96.552.034.829,67	5,03%	Badan Pengelolaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	SILPA			Keuangan dan Aset Daerah
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.921.291.775.572,32		
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	2.590.987.914,00	101,62%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	2.549.743.013,00		
18	Akses publik terhadap informasi	Jumlah dokumen yang dipublikasikan	12		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	keuangan daerah	di website Pemda			
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci (12 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA	12		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran keberhasilan capaian daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Secara lengkap capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat hal – hal sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021, yang mengacupada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016–2021. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selain itu juga membandingkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: a). Nilai 85 s.d \geq 100 kategori Sangat Baik; Nilai 75 s.d $<$ 85 kategori Baik; Nilai 65 s.d $<$ 75 kategori Cukup Baik; Nilai 50 s.d $<$ 65 kategori Sedang; dan Nilai 0 s.d $<$ 50 kategori Kurang.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten

Pacitan Tahun 2016-2021 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2020 sebesar 87,39%.Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori “*SANGAT BAIK*”. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,maka pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,72%. Penurunan ini terjadi karena selain disebabkan karena efek pandemi Covid 19 yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk melakukan refocusing anggaran, yang berakibat kinerja perangkat daerah tidak berjalan secara optimal. Juga disebabkan terdapat beberapa indikator yang tidak dapat diukur kinerjanya dengan optimal, antara lain yaitu Indeks SPBE pada sasaran meningkatnya pelayanan publik yang prima yang tidak dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi karena adanya refocusing anggaran, yang mengakibatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima tidak optimal. Selanjutnya Opini BPK dan Nilai Evaluasi SAKIP pada sasaran meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah yang sampai dengan laporan ini disusun belum keluar hasil pemeriksaan dan evaluasinya. Karena hal hal tersebut menyebabkan rata – rata capaian kinerja pada tahun 2020 menjadi menurun.

Rincian capaian indikator kinerja per-sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.4
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
		2020	
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	50*	Kurang
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	33.33*	Kurang

3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	100.66	Sangat Baik
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	93.63	Sangat Baik
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	106.21	Sangat Baik
6	Menurunnya Pengangguran	106.32	Cukup
7	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	103.57	Sangat Baik
8	Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	133.52	Sangat Baik
9	Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	70.33	Cukup Baik
10	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	-122.61	Kurang
11	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	32.47	Kurang
12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	48.97	Kurang
13	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	420.84	Sangat Baik
14	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	102.42	Sangat Baik
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	99.44	Sangat Baik
16	Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	102.51	Sangat Baik
Rata Rata Capaian Kinerja		87.39	Sangat Baik

b. Pengukuran Kinerja

MISI I : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN MENERAPAKAN GOOD GOVERNANCE

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 1 “**Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian Indikator “**Persentase Perangkat Daerah Dengan Hasil Survei IKM Minimal Baik**” pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%. Sedangkan Target Perangkat Daerah dengan hasil survey IKM minimal baik

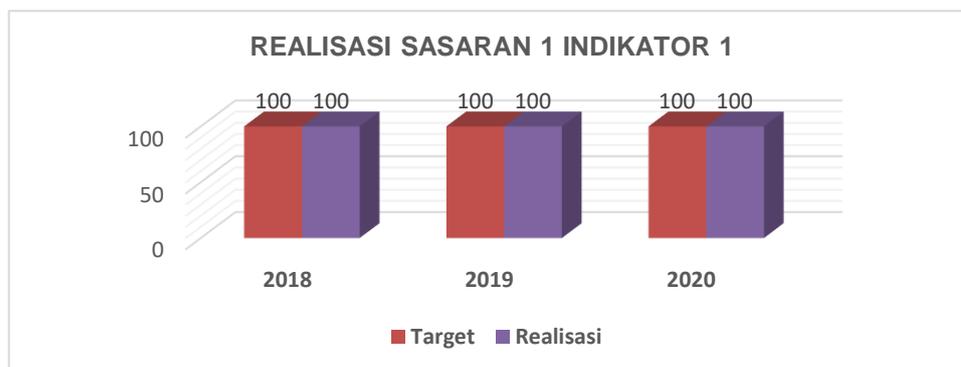
tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 1 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat baik”(100%).

Tabel 2.5

Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik	100	100	100	100



b. Capaian Indikator“ **Pemeringkatan E-Government (PeGi)”**

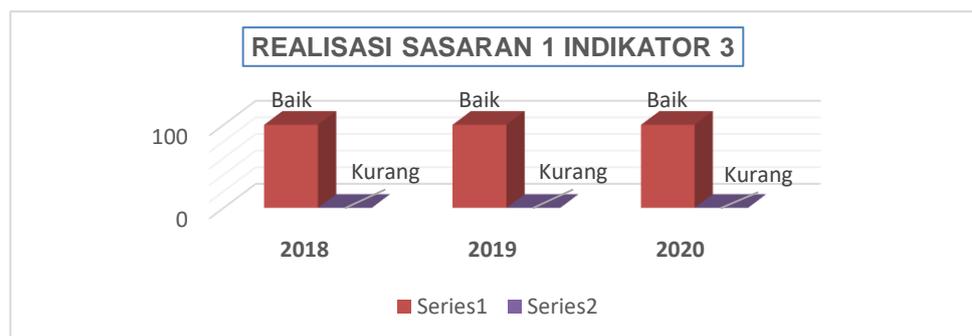
Pemeringkatan E Government (PeGi) terakhir dilakukan penilaian pada tahun 2017 dan sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dengan indicator “**Pemeringkatan E-Government (PeGi)”** diubah menjadi“**Indeks SPBE**”.Sehingga untuk pengukuran pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menggunakan indicator Indeks SPBE.

c. Capaian Indikator “Indeks SPBE” pada tahun 2018 dan 2019 hanya dapat dicapai dengan nilai kurang, sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan. Karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang melakukan penilaian hanya melakukan penilaian secara sample, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk didalamnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat refocusing anggaran di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sehingga penilaian kinerja terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dilaksanakan menyeluruh. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 1 indikator 2 termasuk kategori “Kurang” (0%).

Tabel 2.6

Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks SPBE	Kurang	Baik	-	-



Tidak tercapainya target Indeks SPBE dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pacitan disebabkan oleh :

- Kurangnya komitmen pimpinan dalam penerapan SPBE

- Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SPBE
- Masterplan TIK di Daerah belum memenuhi unsur-unsur SPBE
- Masterplan/ Rencana Induk belum selaras dengan RPJM Daerah
- Belum ada landasan kebijakan yang mengatur fungsi dan layanan SPBE
- Masih lemahnya peran tim koordinasi
- Masih banyaknya pengelolaan sistem elektronik yang dilakukan secara terpisah oleh masing – masing OPD

Mencermati beberapa penyebab tersebut diatas, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain :

- Melaksanakan penguatan kapasitas SDM pengelola SPBE
- Menyusun Peraturan Bupati SPBE
- Memperbarui Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE
- Evaluasi Mandiri SPBE (selesai 31 Oktober 2019)
- Memperbarui SK Tim Koordinasi SPBE
- Koordinasi kebijakan dan tata kelola Sistem Elektronik di OPD
- Pengembangan layanan kinerja pemerintah
- Penjajakan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik
- Draft Kebijakan Tata Naskah Dinas Elektronik

Untuk mewujudkan sasaran 1 tersebut didukung melalui 17 (tujuh belas) program, antara lain :

Tabel 2.7

Program pendukung sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,968,986,000.00	1,628,933,165.00	82.73	340,052,835.00
		Pemeringkatan E-Government (PeGi)	Program Pengembangan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika	1,341,869,550.00	1,324,425,167.00	98.70	17,444,383.00
		Indeks SPBE	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	208,995,000.00	206,793,250.00	98.95	2,201,750.00
			Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	10,330,000.00	9,823,000.00	95.09	507,000.00
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60,096,863,845.00	56,301,612,213.99	93.68	3,795,251,631.01
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5,003,856,635.20	4,258,990,299.00	85.11	744,866,336.20
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	169,708,464.00	169,206,464.00	99.70	502,000.00
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	8,863,821,366.00	8,663,507,555.00	97.74	200,313,811.00
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,304,212,582.00	1,295,373,457.00	99.32	8,839,125.00
			Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah	123,262,600.00	122,692,600.00	99.54	570,000.00
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	153,760,000.00	103,072,300.00	67.03	50,687,700.00
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	108,540,000.00	107,897,700.00	99.41	642,300.00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	189,677,150.00	189,565,050.00	99.94	112,100.00
			Penyebarluasan Informasi Publik Dan Kerja Sama Media Massa	366,555,839.00	363,149,139.00	99.07	3,406,700.00
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1,460,236,500.00	1,380,222,400.00	94.52	80,014,100.00
			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	298,347,850.00	268,724,250.00	90.07	29,623,600.00
				81,669,023,381.20	76,393,988,009.99	93.54	5,275,035,371.21

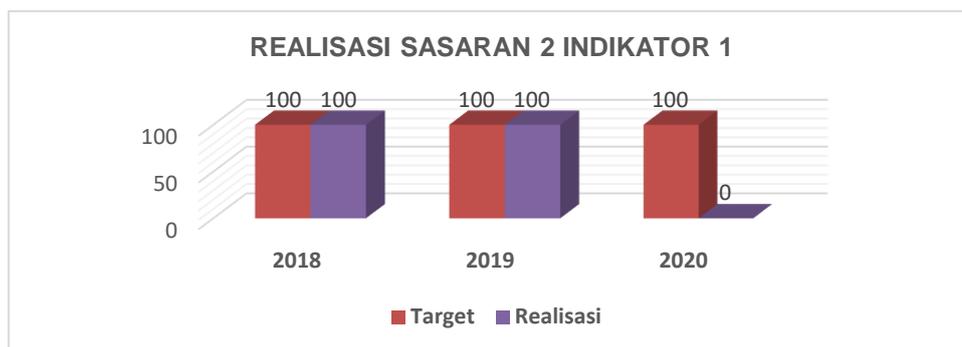
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 2“**Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator“**Opini BPK**” pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%. Target “**Opini BPK**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah WTP dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 2 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat baik”(100%).

Tabel 2.8

Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK	WTP	WTP	-	-

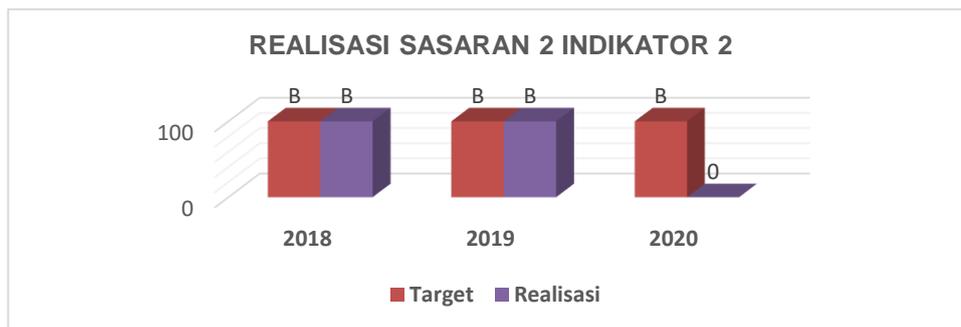


- b. Capaian Indikator “**Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah**” pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%. Target “**Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah B, namun sampai dengan laporan ini disusun Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 2 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat baik”(100%).

Tabel 2.9

Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	B	B	-	-

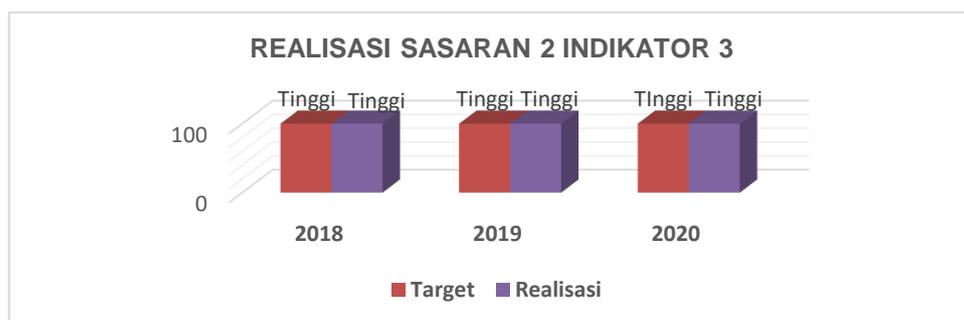


- c. Capaian Indikator “**Nilai LPPD**” pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%. Target “**Nilai LPPD**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah tinggi dan terrealisasikan dengan capaian sebesar 100% atau **Tinggi**. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 2 Indikator 3 termasuk kategori “Sangat baik”(100%).

Tabel 2.10

Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100



Untuk mewujudkan sasaran 2 tersebut didukung melalui 26 (dua puluh enam) program, antara lain :

Tabel 2.11
Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 2

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum	455,182,394.00	447,154,744.00	98.24	8,027,650.00
		Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1,268,107,300.00	1,235,616,940.00	97.44	32,490,360.00
		Nilai LPPD	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Administrasi Pemerintahan	189,124,205.00	179,332,905.00	94.82	9,791,300.00
			Program Peningkatan Kerjasama Daerah	72,004,000.00	64,976,490.00	90.24	7,027,510.00
			Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan	1,070,481,602.00	1,042,301,504.00	97.37	28,180,098.00
			Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang administrasi perekonomian	200,427,058.00	190,128,058.00	94.86	10,299,000.00
			Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat	331,796,022.00	322,884,822.00	97.31	8,911,200.00
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	313,307,800.00	289,880,875.00	92.52	23,426,925.00
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	88,132,300.00	86,177,250.00	97.78	1,955,050.00
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan	18,898,602,500.00	17,394,164,696.00	92.04	1,504,437,804.00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			rakyat daerah				
			Program perencanaan pembangunan daerah	823,311,189.00	762,817,201.00	92.65	60,493,988.00
			Program perencanaan sosiai dan budaya	311,340,600.00	307,112,600.00	8.64	4,228,000.00
			Program perencanaan pembangunan ekonoml	401,356,100.00	395,729,100.00	98.60	5,627,000.00
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	-
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	90,866,000.00	90,421,000.00	99.51	445,000.00
			Program Kelitbangan/Inovasi Daerah	595,538,950.00	594,912,238.00	99.89	626,712.00
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4,298,503,183.00	4,269,485,965.00	99.32	29,017,218.00
			Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2,735,994,870.00	2,666,949,087.00	97.48	69,045,783.00
			Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,814,777,975.00	1,129,908,520.00	62.26	684,869,455.00
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,803,788,629.00	1,746,693,743.00	96.83	57,094,886.00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	891,712,920.00	692,468,498.00	77.66	199,244,422.00
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	200,779,100.00	172,080,200.00	85.71	28,698,900.00
			Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	-	-	-	-
			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	270,068,150.00	207,726,310.00	76.92	62,341,840.00
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	895,973,289.00	824,040,108.00	91.97	71,933,181.00
				38,021,176,136.00	35,112,962,854.00	92.35	2,908,213,282.00

MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

TUJUAN II : MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

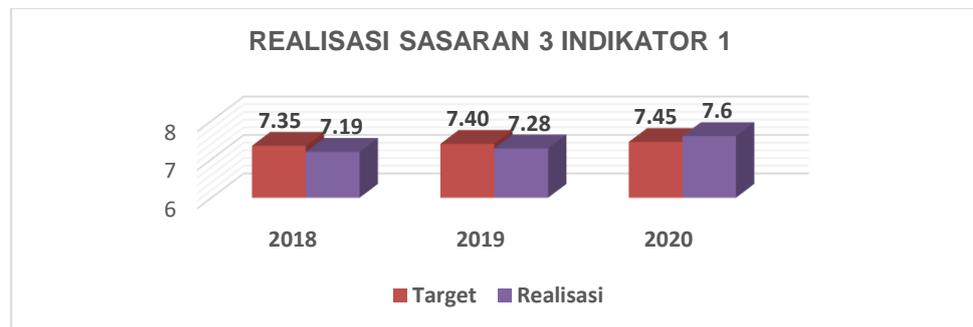
1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 3 "**Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan**" dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator "**Rata Rata Lama Sekolah**" pada tahun 2018 mencapai 97,55% dan 2019 mencapai 98,38%. Target "**Rata Rata Lama Sekolah**" untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 7,45% dan terrealisasisebesar 7,6% dengan capaian sebesar 102,01%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas

maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat baik”(102,01%).

Tabel 2.12

Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 1:

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Rata Rata Lama Sekolah	7.28	7.45	7.6	102.01

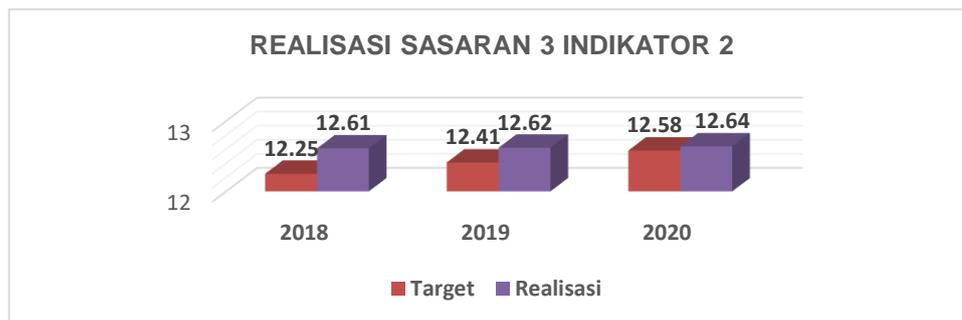


- b. Capaian Indikator “**Harapan Lama Sekolah**” pada 2018 mencapai 102,94%. dan 2019 mencapai 101.69%. Target “**Harapan Lama Sekolah**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 12,58% dan terrealisasisebesar 12,64% dengan capaian sebesar 100,48%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat baik”(100,48%).

Tabel 2.13

Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 2:

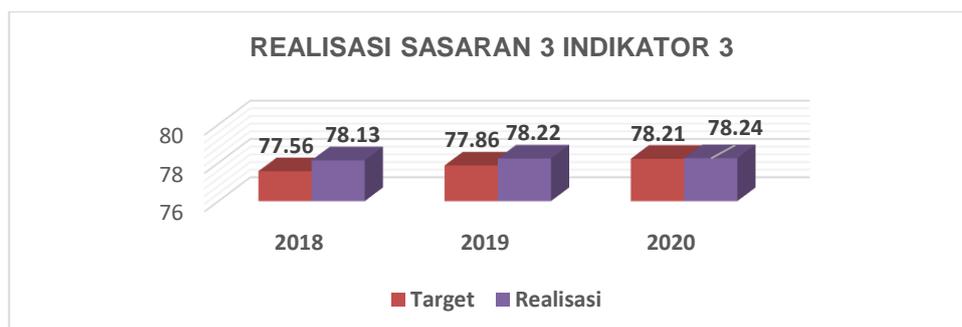
No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	12.62	12.58	12.64	100.48



- c. Capaian Indikator “**Nilai rata rata ujian SD**” pada tahun 2018 mencapai 100,73% dan tahun 2019 mencapai 100,46%. Target “**Nilai rata rata ujian SD**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 78,21% dan terealisasi sebesar 78,24% dengan capaian sebesar 100,4%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 3 termasuk kategori “Sangat baik” (100,4%).

Tabel 2.13
Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai rata rata ujian SD	78.22	78.21	78.24	100.04

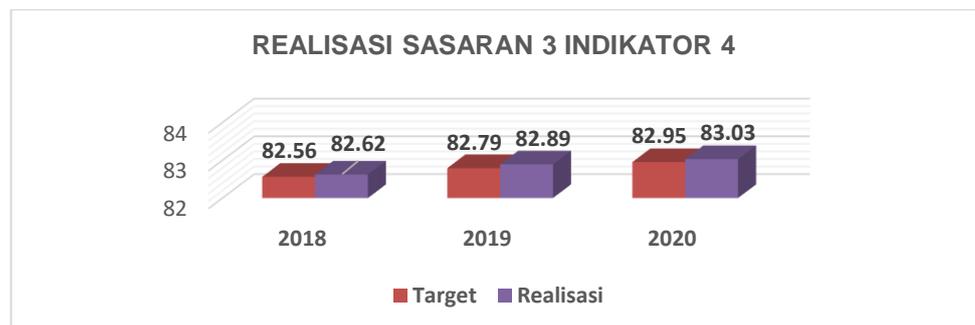


- d. Capaian Indikator “**Nilai rata rata ujian SMP**” pada tahun 2018 mencapai 100,07% dan 2019 mencapai 100,12%. Target “**Nilai rata rata ujian SMP**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 82,95% dan terealisasi sebesar 83,03% dengan capaian sebesar 100,10%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas

maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 4 termasuk kategori “Sangat baik”(100,10%).

Tabel 2.14
Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 4 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai rata rata ujian SMP	82.89	82.95	83.03	100.10



Untuk mewujudkan sasaran 3 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, antara lain :

Tabel 2.15
Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	899,853,800.00	863,028,995.00	95.91	36,824,805.00
		Harapan Lama Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	97,128,755,596.00	94,619,934,168.00	97.42	2,508,821,428.00
		Nilai Rata Rata Ujian	Program Pendidikan Non Formal	1,005,171,850.00	969,134,350.00	96.41	36,037,500.00
		- SD	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,670,929,500.00	6,620,806,975.00	99.25	50,122,525.00
		- SMP	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	242,904,550.00	239,521,550.00	98.61	3,383,000.00
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	368,645,750.00	347,313,500.00	94.21	21,332,250.00
			Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	256,776,000.00	250,859,200.00	97.70	5,916,800.00

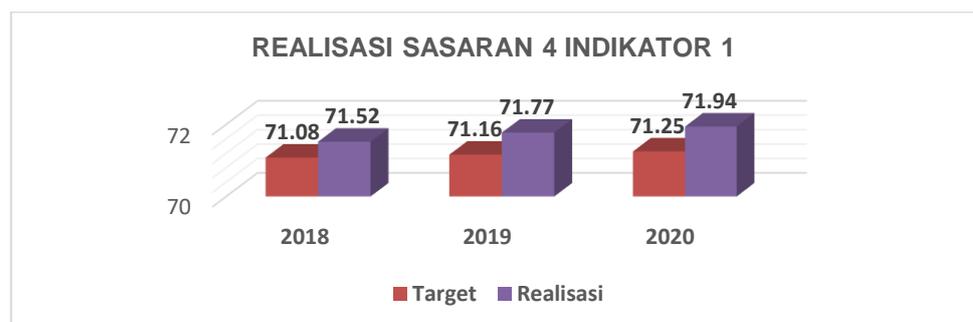
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
				106,573,037,046.00	103,910,598,738.00	97.50	2,662,438,308.00

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 4**“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator**“Angka Harapan Hidup”** pada tahun 2018 mencapai 102,4% dan 2019 mencapai 100,86%. Target **“Angka Harapan Hidup”** untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 71,25% dan terealisasi sebesar 71,94% dengan capaian sebesar 100,97%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 1 termasuk kategori **“Sangat baik”**(100,97%).

Tabel 2.16
Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 1 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	71.77	71.25	71.94	100.97



Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

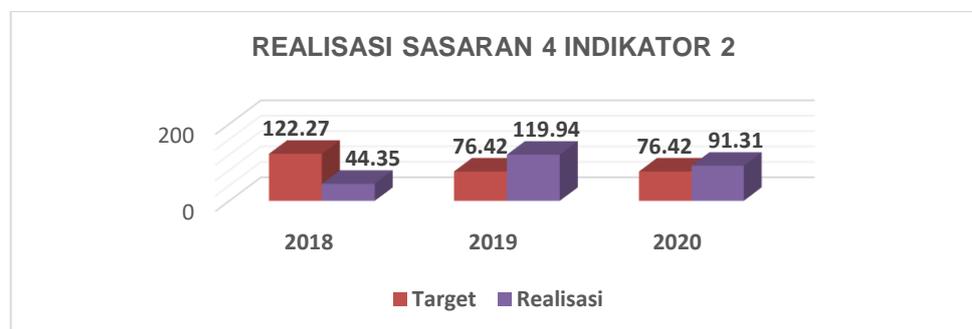
- Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar
- Jumlah kunjungan pasien umum (non BPJS)

- Jumlah unit pelayanan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar
 - Jumlah sasaran Evaluasi JKN ke FKTP
 - Jumlah unit pelaksana teknis menyelenggarakan pelayanan JKN
 - Presentase kunjungan peserta BPJS ke FKTP
 - Jumlah unit pelaksana teknis melaksanakan kegiatan BOK
 - Jumlah maskin yang mendapat jaminan kesehatan (PBI APBD)
- b. Capaian Indikator “**Angka Kematian Ibu**” pada tahun 2018 mencapai 275,69 % dan 2018 mencapai 63,72%. Target “**Angka Kematian Ibu**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 76,42 % dan terealisasi sebesar 91,31 % dengan capaian sebesar 83,69% atau tidak mencapai target RPJMD. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator termasuk kategori “Baik”(83,69%).

Tabel 2.17

Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 2 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian ibu	119.94	76.42	91.31	83.69



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Angka Kematian Ibu disebabkan karena :

1. Akses Pelayanan Kesehatan

2. Perilaku

Masih ada masyarakat yang tidak memeriksakan kehamilan pada tenaga medis saat diketahui terlambat haid atau pada trimester pertama, selain alasan malu karena kehamilan tidak diinginkan, juga karena keterbatasan pengetahuan dan ekonomi sehingga pengetahuan tentang bahaya kehamilan dan resiko tinggi pada kehamilan masih rendah, minimnya sarana transportasi dari rumah ibu ke sarana pelayanan kesehatan sehingga sering terlambat mendapat pertolongan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kehamilan yang tersembunyi atau tidak terdeteksi, mengalami komplikasi yang mengakibatkan kegawatdaruratan obstetrik dan berujung kematian

3. Determinasi Proksi

Yang termasuk dalam penyebab langsung (Proximate Determinant) dari kematian ibu adalah komplikasi yang terjadi saat kehamilan, persalinan dan nifas.

Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Ibu Bayi dan Anak dan Program Jampersal dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah ibu bersalin yang memanfaatkan Jampersal
- Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang tersedia
- Jumlah fasilitator Kelas Ibu
- Jumlah kasus Bumil Gizi Buruk
- Jumlah pembentukan KP ASI

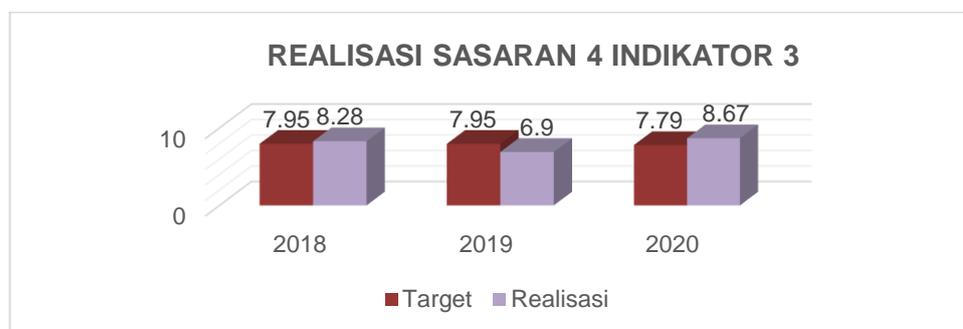
- c. Capaian Indikator **“Angka Kematian Bayi”** pada tahun 2018 mencapai 96,61 % dan 2019 mencapai 115,22%. Target **“Angka Kematian Bayi”** untuk tahun 2020 dilingkup

Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 6,9 % dan terealisasi sebesar 8,67 % dengan capaian sebesar 89,85% atau tidak mencapai target kinerja RPJMD. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 3 termasuk kategori “Sangat Baik”(89,85%).

Tabel 2.17

Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 3 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian bayi	6.9	7.79	8.67	89.85



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Angka Kematian Bayi dikarenakan BBLR (berat bayi lahir rendah) disebabkan antara lain :

- Status gizi ibu bayi sebelum hamil
- Berat badan ibu bayi saat sedang hamil
- Jarak waktu melahirkan anak
- Kondisi kesehatan ibu meliputi anemia, riwayat keguguran dan melahirkan
- BBLR, penyakit infeksi, komplikasi kehamilan dan pregnancy blues
- Melahirkan bayi kembar

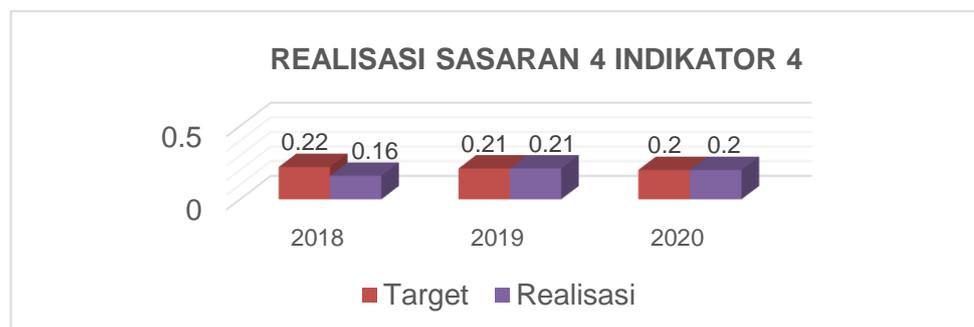
Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan , Ibu Bayi dan Anak, Kegiatan Jampersal dan Kegiatan Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Jumlah ibu bersalin yang memanfaatkan Jampersal
 - Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang disediakan
 - Jumlah Fasilitator kelas Ibu
 - Jumlah Kasus Bumil Gizi Buruk
 - Jumlah Pembentukan KP ASI
- d. Capaian Indikator **“Persentase Balita Gizi Buruk”** pada tahun 2018 mencapai 137,50 % dan 2019 mencapai 100%. Target **“Persentase Balita Gizi Buruk”** untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 0,2 % dan terealisasi sebesar 0,2 % dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 4 termasuk kategori **“Sangat Baik”**(100%).

Tabel 2.18

Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 4 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0.21	0.2	0.2	100.00



Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah Pembentukan Kp ASI
- Jumlah Kasus Bumil Gizi Buruk
- Jumlah Pengadaan obat gizi

Untuk mewujudkan sasaran 4 tersebut didukung melalui 19
(Sembilan Belas) program, antara lain :

Tabel 2.19
Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 4

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	11,749,761,326.00	9,892,858,961.00	84.20	1,856,902,365.00
		Angka Kematian ibu	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata	11,749,823,000.00	10,527,359,593.00	89.60	1,222,463,407.00
		Angka Kematian bayi	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	4,414,859,000.00	4,088,566,787.00	92.61	326,292,213.00
		Persentase Balita Gizi Buruk	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,674,685,000.00	2,640,039,040.00	98.70	34,645,960.00
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	40,705,188,718.16	34,052,470,816.50	83.66	6,652,717,901.66
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	2,328,000,000.00	2,130,750,000.00	91.53	197,250,000.00
			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	-	-	-	-
			Program standarisasi pelayanan kesehatan	4,404,362,986.00	2,971,583,611.00	67.47	1,432,779,375.00
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	84,678,914,985.00	78,482,799,522.60	92.68	6,196,115,462.40
			Program pengembangan lingkungan sehat	1,899,745,000.00	1,627,811,740.00	85.69	271,933,260.00
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	18,227,970,000.00	15,078,040,657.00	82.72	3,149,929,343.00		
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	21,768,718,468.00	15,780,495,023.00	72.49	5,988,223,445.00		

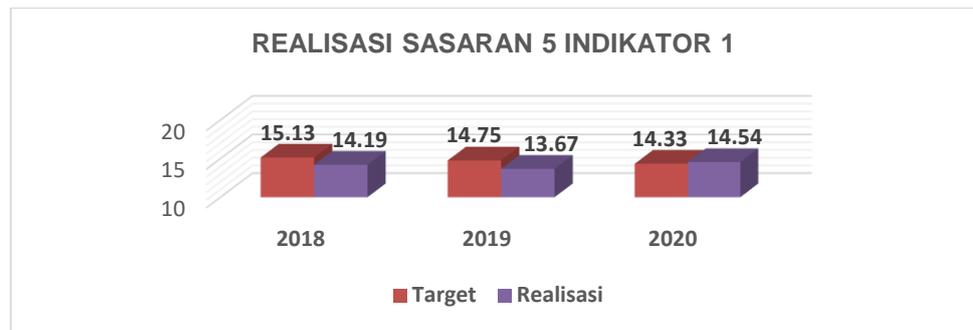
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	470,264,000.00	419,775,400.00	89.26	50,488,600.00
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2,140,447,000.00	1,904,358,982.00	88.97	236,088,018.00
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	11,290,000.00	11,190,000.00	99.11	100,000.00
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	16,187,850.00	16,057,850.00	99.20	130,000.00
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	23,558,425.00	23,558,425.00	100.00	-
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	857,136,417.24	855,566,850.00	99.82	1,569,567.24
			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	-	-	=	-
				208,120,912,175.40	180,503,283,258.10	86.73	27,617,628,917.30

Tujuan III : PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 5 "**Menurunnya Angka Kemiskinan**" dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator "**Angka Kemiskinan**" pada tahun 2018 mencapai 106,42% dan 2019 mencapai 107,90%. Target "**Angka Kemiskinan**" untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 14,33% dan terealisasi sebesar 14,54 % dengan capaian sebesar 106,21%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 5 Indikator 1 termasuk kategori "Sangat baik" (106,21%).

Tabel 2.20
Target Kinerja Sasaran 5 Indikator 1

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	13.67	14.33	14.54	106.21



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Angka Kemiskinan disebabkan karena adanya Covid 19 yang memberikan dampak kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Untuk mewujudkan sasaran 5 tersebut didukung melalui 9 (Sembilan) program, antara lain :

Tabel 2.21
Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 5

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	28,325,000.00	27,125,000.00	95.76	1,200,000.00
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	701,820,000.00	681,565,240.00	97.11	20,254,760.00
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	758,727,500.00	640,526,354.00	84.42	118,201,146.00
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	332,829,000.00	323,697,350.00	97.26	9,131,650.00
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	393,487,000.00	392,468,800.00	99.74	1,018,200.00

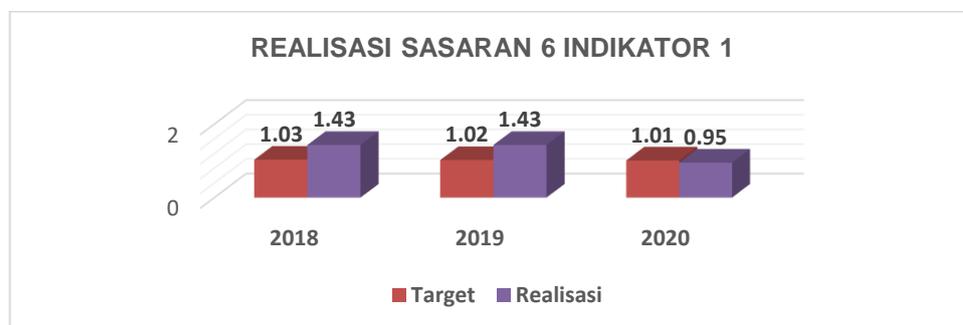
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	696,913,000.00	692,716,330.00	99.40	4,196,670.00
			Program Keluarga Berencana	4,845,433,500.00	3,210,779,983.00	66.26	1,634,653,517.00
			Program pelayanan kontrasepsi	196,073,000.00	140,449,500.00	71.63	55,623,500.00
			Program Fasilitas Transmigrasi	142,150,000.00	142,000,000.00	99.89	150,000.00
				8,095,758,000.00	6,251,328,557.00	77.22	1,844,429,443.00

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 6 “Menurunnya Pengangguran” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” pada tahun 2018 mencapai 72,03% dan 2019 mencapai 71,33%. Target “Tingkat Pengangguran Terbuka” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 1,01% dan terealisasi sebesar 0,95% dengan capaian sebesar 106,32%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 6 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik” (106,32%).

Tabel 2.22
Target Kinerja Sasaran 6 Indikator 1

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.43	1.01	0.95	106.32



Untuk mewujudkan sasaran 6 tersebut didukung melalui 4 (empat) program, antara lain :

Tabel 2.23
Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 6

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
6	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	396,039,100.00	391,612,055.00	98.88	4,427,045.00
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	463,650,000.00	461,207,750.00	99.47	2,442,250.00
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	200,000,000.00	198,955,500.00	99.48	1,044,500.00
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan	1,000,000,000.00	997,305,500.00	99.73	2,694,500.00
				2,059,689,100.00	2,049,080,805.00	99.48	10,608,295.00

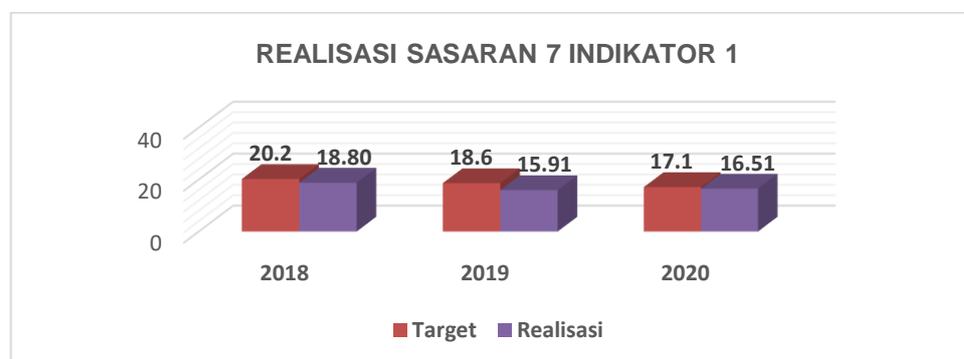
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 7“**Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator“**Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**” pada tahun 2018 mencapai 107,45% dan 2019 mencapai 116,91%. Target “**Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah 16,51% dengan capaian sebesar 103,57%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 7 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik”(103,57%).

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Penyandang Masalah	15.91	17.1	16.51	103.57

	Kesejahteraan Sosial				
--	----------------------	--	--	--	--



Untuk mewujudkan sasaran 7 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, antara lain :

Tabel 2.25

Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 7

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
7	Menurunnya Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpendil (KAT) dan Penyanggung Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya	755,000,000.00	751,534,350.00	99.54	3,465,650.00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,230,500,000.00	1,221,242,650.00	99.25	9,257,350.00
			Program pembinaan eks penyanggung penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	127,950,000.00	126,877,065.00	99.16	1,072,935.00
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	140,000,000.00	139,521,825.00	99.66	478,175.00
			Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender Dan Anak	148,571,000.00	148,502,600.00	99.95	68,400.00
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	136,740,000.00	132,345,841.00	96.79	4,394,159.00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	777,205,900.00	765,895,081.00	98.54	11,310,819.00
				3,315,966,900.00	3,285,919,412.00	99.09	30,047,488.00

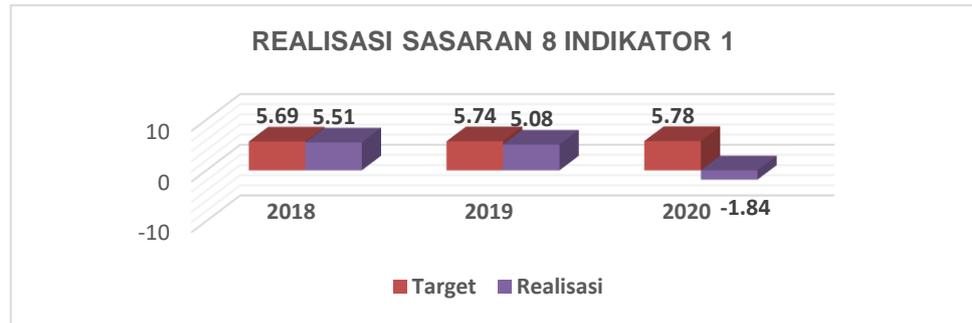
MISI III : MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI

TUJUAN IV: MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI DAERAH

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 8 "**Meningkatnya Kondisi Perekonomian Daerah**" dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator "**Laju Pertumbuhan Ekonomi**" pada tahun 2018 mencapai 96,84% dan 2019 mencapai 89,28%. Target "**Laju Pertumbuhan Ekonomi**" untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 5,78% dan dapat terealisasi sebesar -1,84% dengan capaian sebesar -31,83%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 8 Indikator 1 termasuk kategori "Sangat Kurang" (-31,83%).

**Tabel 2.26
Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.08	5.78	-1.84	-31.83



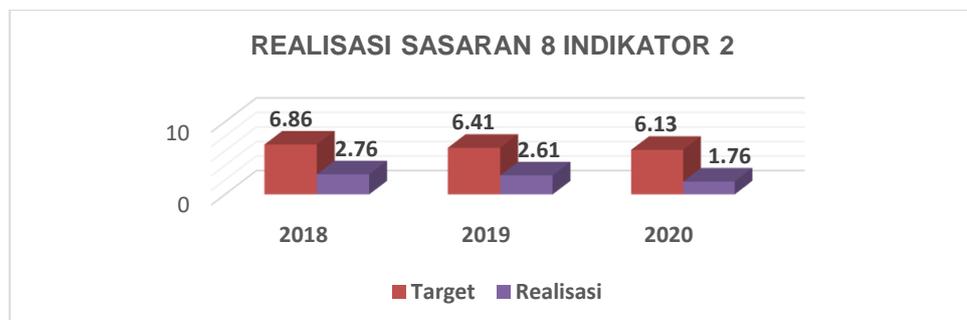
Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi disebabkan karena adanya Covid 19. Memberikan dampak ekonomi dan menyebabkan resesi global yang berefek kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung minus.

- b. Capaian Indikator **“Tingkat Inflasi”** pada tahun 2018 mencapai 248,25% dan 2019 mencapai 245,59%. Target **“Tingkat Inflasi”** untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 6,13% dan terrealisasi sebesar 1,76% dengan capaian sebesar 348,30%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 8 Indikator 2 termasuk kategori **“Sangat Baik”** (348,30%).

Tabel 2.27

Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 2

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Inflasi	2.61	6.13	1.76	348.30

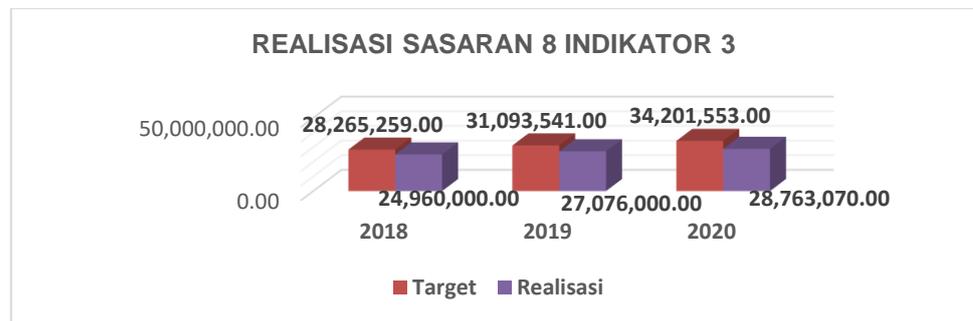


- c. Capaian Indikator “PDRB Per Kapita” pada tahun 2018 mencapai 88,31% dan 2019 mencapai 87,08%. Target “PDRB Per Kapita” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 34.201.553,00 dan terrealisasisebesar 28.763.070,00 dengan capaian sebesar 84,10%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 8 Indikator 3 termasuk kategori “Baik” (84,10%).

Tabel 2.28

Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 3

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	PDRB Per Kapita	27,076,000.00	34,201,553.00	28,763,070.00	84.10



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator PDRB Perkapita disebabkan karena adanya Covid 19. Memberikan dampak ekonomi dan menyebabkan resesi global yang berefek kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima.

Untuk mewujudkan sasaran 8 tersebut didukung melalui 8 (delapan) program, antara lain :

Tabel 2.29
Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 8

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
8	Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	262,778,000.00	262,628,000.00	99.94	150,000.00
		Tingkat Inflasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	375,686,000.00	370,364,000.00	98.58	5,322,000.00
		PDRB Per Kapita	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	5,354,000.00	4,998,000.00	93.35	356,000.00
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,921,745,000.00	1,855,439,000.00	96.55	66,306,000.00
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	2,339,500,000.00	2,327,185,767.00	99.47	12,314,233.00
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	8,401,706,000.00	8,038,606,258.00	95.68	363,099,742.00
			Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	46,600,000.00	44,940,700.00	96.44	1,659,300.00
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan	92,400,000.00	92,016,700.00	99.59	383,300.00
					13,445,769,000.00	12,996,178,425.00	96.66

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 9“**Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

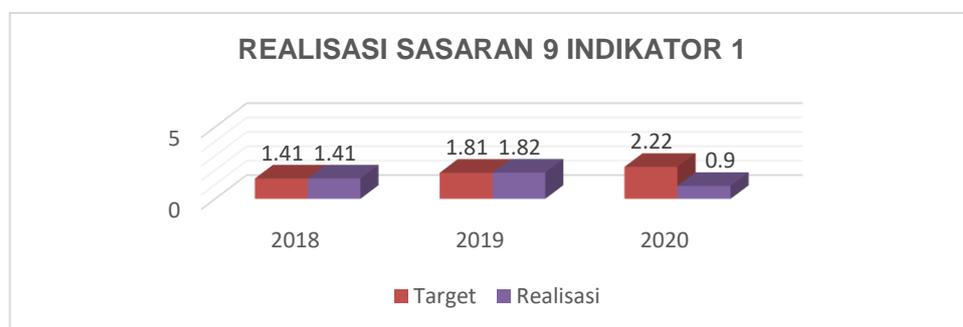
- a. Capaian Indikator“**Persentase Koperasi Mandiri**”pada tahun 2018 mencapai 100% dan 2019 mencapai 100,55%. Target “**Persentase Koperasi Mandiri**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

adalah 2,22% dan terrealisasi sebesar 0,9% dengan capaian sebesar 40,54%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 9 Indikator 1 termasuk kategori “Kurang”(40,54%).

Tabel 2.30

Kinerja Sasaran 9 Indikator 1 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Mandiri	1.82	2.22	0.9	40.54



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Persentase Koperasi Mandiri disebabkan oleh :

- Kerjasama antar perangkat organisasi koperasi (pengurus, pengawas dan anggota) kurang maksimal, pengurus koperasi rangkap jabatan menimbulkan fokus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang, kualitas SDM tentang perkoperasian yang masih terbatas, pembukuan dan administrasi koperasi tidak dijalankan dengan baik
- Masih rendahnya masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dan kurangnya inovasi koperasi untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.
- Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi : usaha yang

dijalankan koperasi cenderung monoton dan tidak berada pada sektor-sektor strategis.

- Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan berkoperasi, kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat.

Atas permasalahan yang dihadapi, solusi yang akan dilakukan adalah :

- Memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi ; membenahi kondisi internal koperasi.
- Memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam pengembangan koperasi ; adanya edukasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai jati diri koperasi yang sebenarnya.
- Mendorong koperasi agar dapat mengembangkan usahanya dalam bidang-bidang yang lebih menjanjikan ; pemberian modal koperasi oleh pemerintah dan juga masyarakat yang memiliki dana dapat menyimpan uang mereka dikoperasi supaya memperluas usahanya.
- Menyediakan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan supaya lebih efektif.

Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :

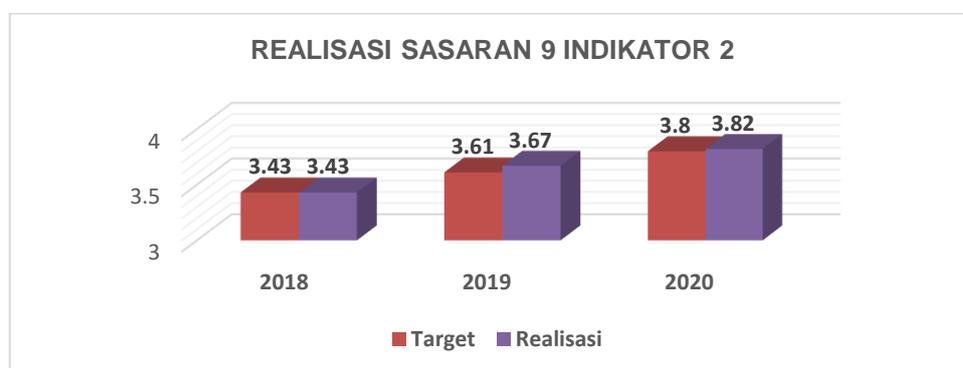
1. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta Sosialisasi bagi Anggota Koperasi.
2. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan output yang dihasilkan jumlah pengurus koperasi yang dibina.
3. Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP dengan output yang dihasilkan Jumlah KSP yang dinilai.

- b. Capaian Indikator “ **Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru**” pada tahun 2018 mencapai 94,75% dan 2019 mencapai 101,66%. Target “ **Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 3,80% dan terrealisasisebesar 3,82% dengan capaian sebesar 100,53%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 9 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat Baik”(100,53%).

Tabel 2.31

Kinerja Sasaran 9 Indikator 2 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru	3.67	3.8	3.82	100.53



Untuk mewujudkan sasaran 9 tersebut didukung melalui 2 (Dua) program, antara lain :

Tabel 2.32

Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 9

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
9	Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase Koperasi Mandiri	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	198,450,000.00	198,249,556.00	99.90	200,444.00
		Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil	55,500,000.00	55,400,000.00	99.82	100,000.00

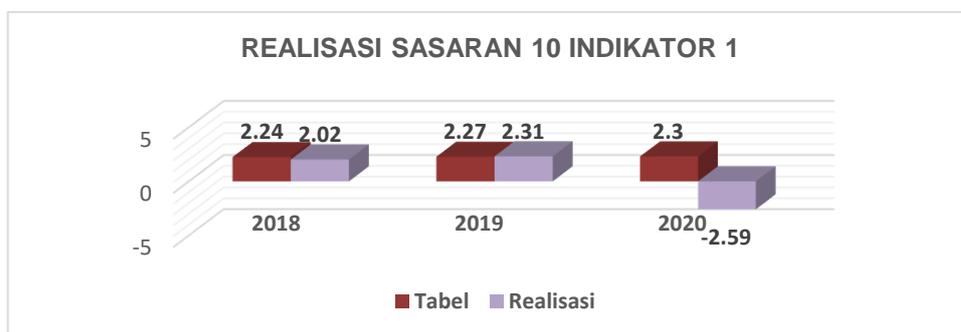
			Menengah yang kondusif				
				253,950,000.00	253,649,556.00	99.88	300,444.00

3. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 10 "**Meningkatnya Kinerja Sektor Industri**" dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian Indikator "**Persentase Pertumbuhan Industri**" pada tahun 2018 mencapai 90,18% dan 2019 mencapai 101,76%. Target "**Persentase Pertumbuhan Industri**" untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 2,3% dan terealisasi sebesar -2,59% dengan capaian sebesar -122,61%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 10 Indikator 1 termasuk kategori "Sangat Kurang" (-122,61%).

Tabel 2.33
Kinerja Sasaran 10

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan Industri	2.31	2.3	-2.59	-112.61



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Persentase Pertumbuhan Industri disebabkan oleh :

- Dampak covid 19 bagi IKM membuat pasar terpuruk sehingga omzet turun bahkan ada IKM yang tutup sementara dan beralih ke usaha lainnya.
- Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Pacitan sehingga menyulitkan investor industri yang akan berinvestasi di Kab.Pacitan
- Belum menegatuhinya penerapan sistem perijinan terintegrasi secara elektronik khususnya SIINAS bagi sebagian besar pelaku industri formal

Atas permasalahan yang dihadapi, solusi yang akan dilakukan adalah :

- Menggalakkan pemasaran online dan membangun kemitraan dengan instansi dan lembaga untuk membantu pemasaran produk IKM
- Mengusulkan kawasan peruntukan industri di RTRW Kabupaten Pacitan 2022 – 2042
- Sosialisasi dan pendampingan bagi para pelaku IKM formal dalam penerapan SIINAS

Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan program/ kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Pendataan Industri Kecil Menengah
- Pembinaan Industri Kecil Menengah
- Pameran Produk unggulan

Untuk mewujudkan sasaran 10 tersebut didukung melalui 2 (Dua) program, antara lain :

Tabel 2.34

Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 10

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
10	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	959,000,000.00	887,081,157.00	92.50	71,918,843.00

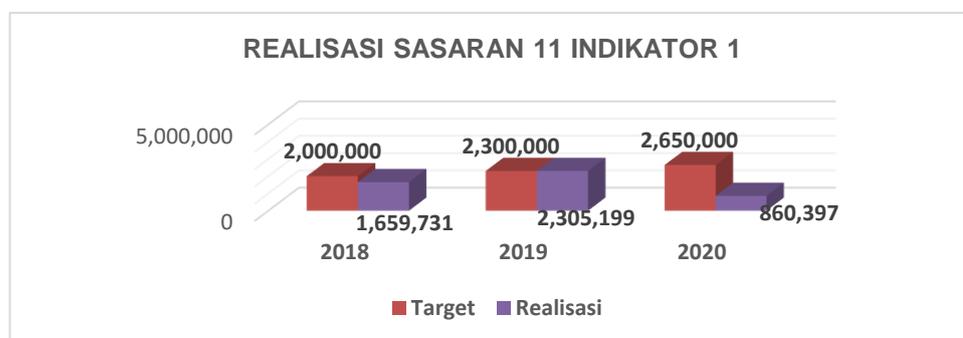
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	656,000,000.00	546,447,200.00	83.30	109,552,800.00
				1,615,000,000.00	1,433,528,357.00	88.76	181,471,643.00

4. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 11 **“Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata”** dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator **“Jumlah Kunjungan Wisata”** pada tahun 2018 mencapai 82,99% dan 2019 mencapai 100,29%. Target **“Jumlah Kunjungan Wisata”** untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 2.650.000 dan terealisasi sebesar 860.397 dengan capaian sebesar 32,47%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 11 Indikator 1 termasuk kategori **“Kurang”**(32,47%).

Tabel 2.35
Kinerja Sasaran 11

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2,305,199	2,650,000	860,397	32.47



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisata disebabkan oleh :

- Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 atau corona virus yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Hal ini tentunya melemahkan sistem perekonomian dari berbagai sektor
- Kurangnya SDM Pariwisata yang bersertifikasi
- Sarana Prasarana Pengembangan Fasilitas Destinasi Masih belum optimal
- Masih kurangnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan Promosi Pariwisata
- Masih kurang minat masyarakat dalam pembentukan desa wisata

Atas permasalahan yang dihadapi, solusi yang akan dilakukan adalah :

- Berharap pandemi covid 19 segera berakhir dan mempersiapkan daerah tujuan wisata dengan lulus sertifikasi protokol kesehatan
- Usulan sertifikasi bagi SDM Pelaku pariwisata melalui pelatihan Provinsi maupun pusat
- Penganggaran lebih di Fokuskan pada Pengembangan Fasilitas Destinasi Pariwisata
- Perlu adanya kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam mempromosikan wisata daerah baik dalam maupun luar negeri
- Perlu dukungan dari semua pihak dalam menumbuhkan desa wisata

Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan program/kegiatan :

- Program Pemasaran Pariwisata

- Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
- Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan diluar Negeri
- Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Dengan *Out Put* Program Pemasaran Pariwisata sebagai berikut:

- Jumlah Kerjasama Yang Dihasilkan Melalui Promosi Pariwisata sejumlah 8 Kerjasama (Pembuatan Lief lead, Pembuatan broklet, MOU dengan PT. ANgkasa Pura, Kerjasama dengan UMKM, Kerjasama dengan Biro Travel, Kerjasama dengan Hotel dan Restaurant, Duta Wisata, Kerjasama dengan Bandara Juanda.
- Jumlah Obyek Pariwisata yang dipasarkan melalui TI sejumlah 14 DTW

Untuk mewujudkan sasaran 11 tersebut didukung melalui 4 (empat) program, antara lain :

Tabel 2.36
Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 11

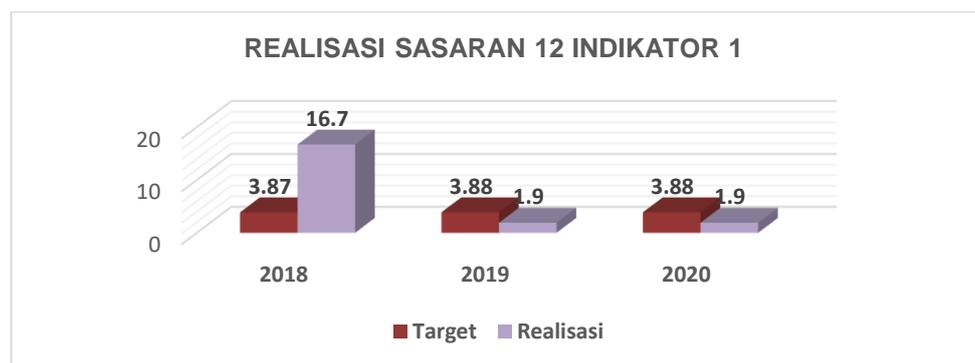
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
11	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	15,149,837,760.00	14,214,398,276.00	93.83	935,439,484.00
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	538,956,000.00	518,761,700.00	96.25	20,194,300.00
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2,719,240,000.00	2,692,745,600.00	99.03	26,494,400.00
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	958,525,000.00	945,187,914.00	98.61	13,337,086.00
				19,366,558,760.00	18,371,093,490.00	94.86	995,465,270.00

5. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 12 “**Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator “ **Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan**” pada tahun 2018 mencapai 431,52% dan 2019 mencapai 48,97%. Target “**Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 3,88% dan terealisasi sebesar% dengan capaian sebesar%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 12 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik”(147,68%).

Tabel 2.37
Kinerja Sasaran 12

NO	INDIKATOR	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	KINERJA 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan	1.9	3.88	1.9	48.97



Untuk mewujudkan sasaran 12 tersebut didukung melalui 10 (sepuluh) program, antara lain :

Tabel 2.38
Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 12

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	17,895,114,500.00	17,112,178,144.00	95.62	782,936,356.00
			Program pengembangan perikanan tangkap	1,742,320,000.00	1,733,534,500.00	99.50	8,785,500.00
			Program pengembangan budidaya perikanan	3,103,516,000.00	3,070,560,825.00	98.94	32,955,175.00
			Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	859,250,000.00	842,049,867.00	98.00	17,200,133.00
			Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	318,000,000.00	313,336,900.00	98.53	4,663,100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan	435,000,000.00	406,355,460.00	93.42	28,644,540.00
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	1,294,572,000.00	1,269,941,000.00	98.10	24,631,000.00
			Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	950,000,000.00	929,840,550.00	97.88	20,159,450.00
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	250,000,000.00	246,079,500.00	98.43	3,920,500.00
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	5,555,000,000.00	4,805,588,560.00	86.51	749,411,440.00
							32,402,772,500.00

TUJUAN V :MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

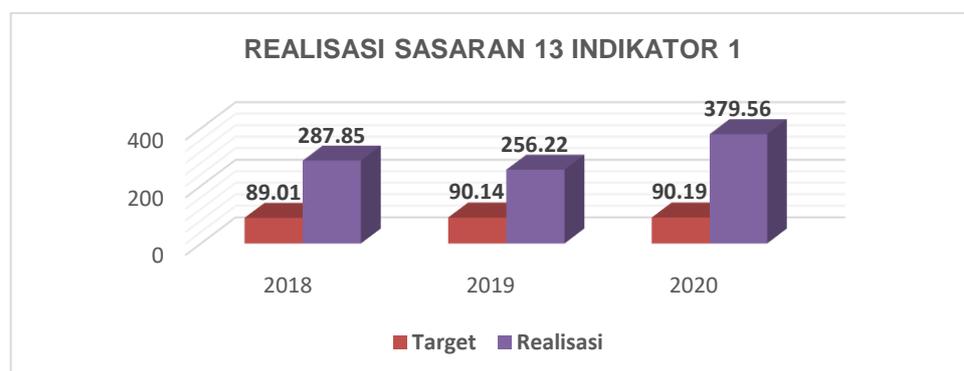
1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 12“**Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan**” dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator“**Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)**”pada tahun 2018 mencapai

284,37% dan 2019 mencapai 272,82%. Target “**Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 90,19% dan terealisasi sebesar 379,56% dengan capaian sebesar 420,84%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 13 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik” (420,84%).

Tabel 2.39

Kinerja Sasaran 13 Indikator 1

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)	256.22	90.19	379.56	420.84



Untuk mewujudkan sasaran 13 tersebut didukung melalui 2 (Dua) program, antara lain :

Tabel 2.40

Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 13

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
13	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	2,013,192,500.00	1,951,894,065.00	96.96	61,298,435.00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2,010,400,000.00	1,941,481,291.00	96.57	68,918,709.00
				4,023,592,500.00	3,893,375,356.00	96.76	130,217,144.00

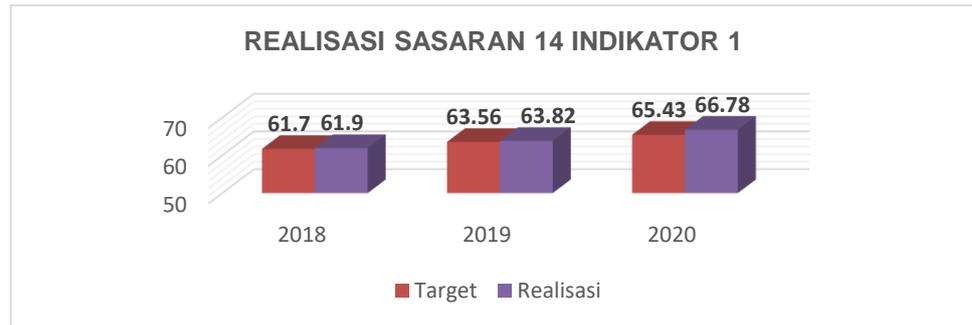
TUJUAN VI : MENINGKATKAN CAKUPAN DAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG Mendukung Aktifitas Pembangunan Secara Berkelanjutan

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 14 **“Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah”** dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator **“Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap”** pada tahun 2018 mencapai 100,32% dan 2019 mencapai 100,41%. Target **“Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap”** untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 65,43% dan terealisasi sebesar 66,78% dengan capaian sebesar 102,06%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 14 Indikator 1 termasuk kategori **“Sangat Baik”** (102,06%).

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Sasaran 14 Indikator 1

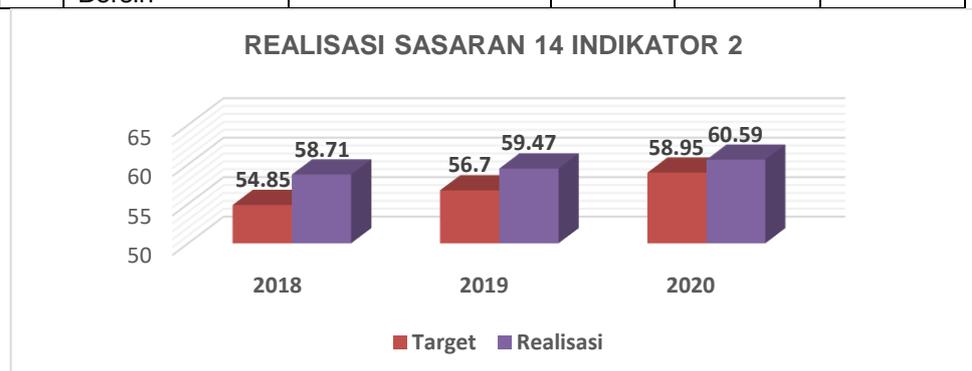
No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	63.82	65.43	66.78	102.06



- b. Capaian Indikator “**Persentase Penduduk Berakses Air Bersih**” pada tahun 2018 mencapai 107,04% dan 2019 mencapai 104,89%. Target “**Persentase Penduduk Berakses Air Bersih**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 58.95% dan terealisasi sebesar 60,59% dengan capaian sebesar 102,78%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 14 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat Baik” (102,78%).

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Sasaran 14 Indikator 2

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	59.47	58.95	60.59	102.78



Untuk mewujudkan sasaran 14 tersebut didukung melalui 19 (Sembilanbelas) program, antara lain :

Tabel 2.43

Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 14

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
14	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program pembangunan jalan dan jembatan	19,680,000,000.00	19,086,790,537.00	96.99	593,209,463.00
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	51,526,958,000.00	49,456,835,912.00	95.98	2,070,122,088.00
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2,237,000,000.00	2,166,639,550.00	96.85	70,360,450.00
			Program pembangunan Infrastruktur perdesaan	25,804,791,500.00	25,149,375,557.00	97.46	655,415,943.00
			Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	24,756,241,500.00	24,224,147,565.00	97.85	532,093,935.00
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sarana Prasarana Permukiman	2,623,000,000.00	2,569,498,350.00	97.96	53,501,650.00
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5,395,396,200.00	5,389,650,951.00	99.89	5,745,249.00
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	277,000,000.00	276,397,735.00	99.78	602,265.00
			Program peningkatan pelayanan angkutan	1,223,500,000.00	1,202,669,789.00	98.30	20,830,211.00
			Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	50,000,000.00	49,940,974.00	99.88	59,026.00
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1,594,300,000.00	1,562,884,864.00	98.03	31,415,136.00
			Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7,184,380,000.00	6,748,481,013.00	93.93	435,898,987.00

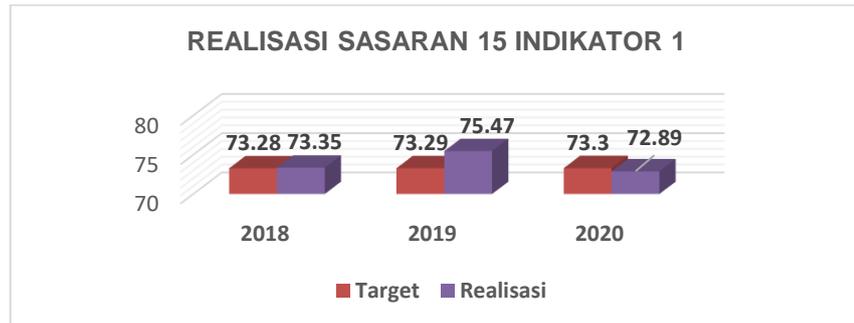
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3,608,000,000.00	3,513,786,322.00	97.39	94,213,678.00
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	20,988,000,000.00	20,054,927,371.00	95.55	933,072,629.00
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	6,475,825,000.00	6,141,882,480.00	94.84	333,942,520.00
			Program Perencanaan Tata Ruang	786,150,000.00	746,486,038.00	94.95	39,663,962.00
			Program Pemanfaatan Ruang	125,680,000.00	101,304,820.00	80.61	24,375,180.00
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	389,690,000.00	386,569,279.00	99.20	3,120,721.00
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	550,000,000.00	492,692,248.00	89.58	57,307,752.00
				175,275,912,200.00	169,320,961,355.00	96.60	5,954,950,845.00

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 15 "**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**" dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator "**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**" pada tahun 2018 mencapai 100,10% dan 2019 mencapai 102,97%. Target "**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**" untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 73,3% dan terealisasi sebesar 72,89% dengan capaian sebesar 99,44%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 15 Indikator 1 termasuk kategori "Sangat Baik" (99,44%).

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Sasaran 15

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.47	73.3	72.89	99.44



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikarenakan anggaran untuk mendukung Indeks Pencemaran Air & Udara terkena refocusing Covid 19.

Untuk mewujudkan sasaran 15 tersebut didukung melalui 5 (lima) program, antara lain :

Tabel 2.45
Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 15

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7,816,029,000.00	6,469,199,282.00	82.77	1,346,829,718.00
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	100,000,000.00	96,152,000.00	96.15	3,848,000.00
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2,270,000,000.00	2,227,148,039.00	98.11	42,851,961.00
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	812,000,000.00	749,394,182.00	92.29	62,605,818.00
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	442,000,000.00	395,543,165.00	89.49	46,456,835.00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
				11,440,029,000.00	9,937,436,668.00	86.87	1,502,592,332.00

MISI IV : MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

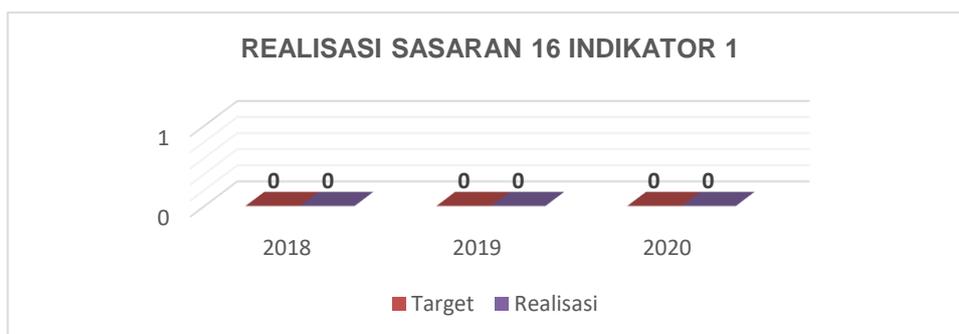
TUJUAN IV: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERMASYARAKAT

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 16 “**Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator “**Jumlah Konflik Bernuansa SARA**” pada tahun 2018 mencapai 100% dan 2019 mencapai 100%. Target “**Jumlah Konflik Bernuansa SARA**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 0 dan terrealisasi sebesar 0 dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 16 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik”(100%).

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 1

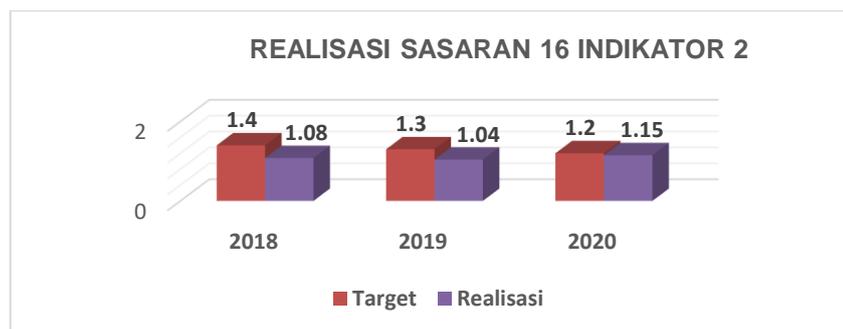
No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0	0	0	100



- b. Capaian Indikator “**Angka Kriminalitas**” pada tahun 2018 mencapai 129,63% dan 2019 mencapai 125%. Target “**Angka Kriminalitas**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 1,2 dan terrealisasisebesar 1,15 dengan capaian sebesar 104,35%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 16 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat Baik” (104,35%).

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 2

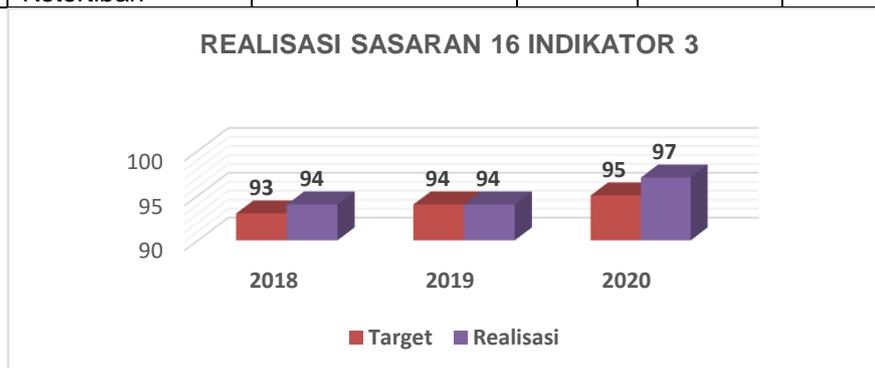
No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kriminalitas	1.04	1.2	1.15	104



- c. Capaian Indikator “**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban**” pada tahun 2018 mencapai 101,08% dan 2019 mencapai 100%. Target “**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban**” untuk tahun 2020 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 95 dan terrealisasisebesar 97 dengan capaian sebesar 102,11%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 16 Indikator 3 termasuk kategori “Sangat Baik” (102,11%).

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 3

No	Indikator	Capaian RPJMD Tahun Lalu (2019)	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	94	95	97	102



Untuk mewujudkan sasaran 16 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, antara lain :

Tabel 2.49
Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 16

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
16	Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Konflik Bermanfaat SARA	Program peningkatan kerukunan umat beragama	1,591,000,000.00	1,504,590,571.00	94.57	86,409,429.00
		Angka Kriminalitas	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	580,488,000.00	567,398,850.00	97.75	13,089,150.00
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	170,500,000.00	163,117,250.00	95.67	7,382,750.00
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	680,560,000.00	678,565,389.00	99.71	1,994,611.00
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	2,313,450,000.00	2,183,324,190.00	94.38	130,125,810.00
			Program pendidikan politik masyarakat	945,000,000.00	933,704,450.00	98.80	11,295,550.00

			Program Pengembangan Nilai Budaya	1,893,090,000.00	1,888,158,900.00	99.74	4,931,100.00
				8,174,088,000.00	7,918,859,600.00	96.88	255,228,400.00

BAB III

CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/ atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah perwujudan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2020 mencakup Urusan Pilihan yaitu ***Pertanian***.

Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 seluruhnya sebesar Rp. 5.154.710.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.060.585.500,00 atau 98,17% terdiri dari :

1. Urusan Pilihan sebesar Rp. 5.154.710.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.060.585.500,00 atau 98,17%.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Pacitan adalah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 23/KPTS/KP. 02/M/ I/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor. 913/782/110.05/2020.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Gambaran umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

a) Urusan Pilihan

➤ Urusan Pertanian

Pelaksanaan tugas pembantuan pada pada urusan pertanian diprioritaskan pada 4 program adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
4. Program Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian;

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan Oleh
Pemerintah Pusat

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
1	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian		
	Honor Programa	47 OB	Kab. Pacitan
	Honor/ Gaji THL	611 OB	Kab. Pacitan
	BOP	1.092 OB	Kab. Pacitan
2	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		
	Bantuan Pemerintah Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Survey dan Investigasi Design Air/ SID)	2 Paket	Kelompok Tani Gemah Ripah 7 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
			Kelompok Tani Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana dalam Bentuk Uang (Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpipaan)	2 Unit	Kelompok Tani Gemah Ripah 7 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
			Kelompok Tani Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
	Operasional / Pendukung Kabupaten	1 Paket	Kabupaten Pacitan
	Operasional/ Pendukung dari Provinsi	1 Paket	Kabupaten Pacitan
3	Perpipaan APBN Pusat TA. 2020		
	Margo Mulyo I	1 unit	Purworejo, Pacitan
	Sumber Urip I	1 unit	Kayen, Pacitan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
4	Perpompaan APBN PUSAT TA. 2020		
	Margo Makmur IV	1 unit	Gunungsari, Arjosari
	Sumber Makmur 5	1 unit	Banjarjo, Kebonagung
5	Jalan Usaha Tani		
	Ngudi Rahayu 1	1 unit	Sukorejo, Sudimoro
	Setyo Tani	1 unit	Sukorejo, Sudimoro
	Margo Rukun IV	1 unit	Tanjunglor, Ngadirojo
	Ngupadi Hasil II	1 unit	Tulakan, Tulakan
	Mekar Sari 6	1 unit	Losari, Tulakan
	Mekar Sari 7	1 unit	Losari, Tulakan
	Gemah Ripah 3	1 unit	Wonoanti, Tulakan
	Jati Mulyo 3	1 unit	Jatigunung, Tulakan
	Jati Mulyo 8	1 unit	Jatigunung, Tulakan
	Bumi Harum 13	1 unit	Sidomulyo, Kebonagung
	Sumber Urip IV	1 unit	Kayen, Pacitan
	Mekar Sari	1 unit	Sedeng, Pacitan
	Karya Tani	1 unit	Tambakrejo, Pacitan
	Rukun Makmur IV	1 unit	Gayuhan, Arjosari
	Rukun Makmur VI	1 unit	Gayuhan, Arjosari
	Ngudi Mulyo	1 unit	Donorojo, Donorojo
	Sido Mukti	1 unit	Tinatar, Punung
	Nawanggono	1 unit	Nawangan, Nawangan
	Sri Mulyo	1 unit	Jetislor, Nawangan
	Sido Makmur II	1 unit	Tokawi, Nawangan
	Sidorejo	1 unit	Penggung, Nawangan
	Ngudi Rahayu II	1 unit	Ngromo, Nawangan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
	Sinar Harapan	1 unit	Pakis Baru, Nawangan
	Nggrening II	1 unit	Bandar, Bandar
	Endah Peni	1 unit	Bangunsari, Bandar
	Suroloyo I	1 unit	Bandar, Bandar
	Sido Maju	1 unit	Bandar, Bandar
	Ngudi Mulyo	1 unit	Bandar, Bandar
	Karya Tani	1 unit	Jeruk, Bandar
	Karya Makmur III	1 unit	Ploso, Tegalombo

3.1.2 Realisasi

Realisasi kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dalam matriks berikut ini :

Tabel 3.2
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh daerah

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUKASAN	PROGRAM,KEGIATAN , OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKSI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Pertanian	a) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 23/KPTS/KP. 02/II/I/2020 tanggal 8 Januari 2020; b) SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor. 913/782/110.05/2020; c) DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur TA. 2020 SP DIPA Nomor 18.08.4.059186/2020 tanggal 12 November 2019; d) SP DIPA-018.03.4.059178/2020 Revisi ke 04 tanggal 19 Juni 2020; e) SP DIPA - 018.08.1.633656/2020;	a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian;	Kab. Pacitan ;	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	1.350.160.000	1.350.160.000	100	47 OB 611 OB 1.092 OB	100	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKSI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kelompok Tani Gemah Ripah 7 Desa Gemah arjo Kecamatan Tegalmbo; Kelompok Tani Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalmbo	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	261.000.000,-	261.000.000,-	90,14	2 Paket Survey dan Investigasi Design Air/SID; 2 Unit Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpipaan; 2 Paket Operasional / Pendukung Kabupaten	100	
			c. Program Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian								
			1 Kegiatan Perpipaan APBN Pusat TA. 2020	Purworejo, Pacitan Kayen, Pacitan	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	200.000.000,-	200.000.000,-	100	2 unit perpipaan	100	
			2 Kegiatan Perpompaan APBN PUSAT TA. 2020	Gunungsari, Arjosari Banjargo, Kebona gung	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	260.000.000,-	260.000.000,-	100	2 unit perpompaan	100	
			3 Kegiatan Jalan Usaha Tani APBN PUSAT TA. 2020	Sukorejo, Sudimoro Sukorejo, Sudimoro Tanjunglor, Ngadirojo Tulakan, Tulakan Losari, Tulakan Losari, Tulakan Wonca nti, Tulakan Jatigunung, Tulakan Jatigunung, Tulakan Sidomulyo, Kebonagunung Kayen, Pacitan Sedeng, Pacitan Tambakrejo, Pacitan Gayuhan, Arjosari Gayuhan, Arjosari Donorojo, Donorojo Tinatar, Punung Nawangan, Nawangan	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	3.460.000.000,-	3.460.000.000,-	100	30 unit jalan usaha tani	100	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
				gan Jetislor, Nawan gan Tokawi, Nawan gan Pengu ng, Nawan gan Ngromo , Nawan gan Pakis Baru, Nawan gan Bandar, Bandar Bangun sari, Bandar Bandar, Bandar Bandar, Bandar Bandar, Bandar Jeruk, Bandar Ploso, Tegalo mbo							

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Target Kinerja Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
1	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi		
	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	1 paket	se-kab
2	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Panga		
	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat (benih padi inbrida)	1.900 ha	se-kab

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat (benih jagung hibrida)	1.350 ha	Kec Donorojo, Punung, Pringku, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tulakan, Tegalombo, Sudimoro
	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	1 paket	se-kab

3.2.2 Realisasi

Realisasi kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam matriks berikut ini :

Tabel 3.4
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh daerah

NO	INSTANSI	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN , OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKSI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	a) SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor. 913/782/110.05/2020 b) SP DIPA-018.03.4.059178/2020 Revisi ke 04 tanggal 19 Juni 2020	a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 1. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Kab. Pacitan ; Kec Donorojo, Punung, Pringku, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tulakan, Tegalombo, Sudimoro; se kab. Pacitan	Dinas Pertanian Kab. Pacitan Dinas Pertanian Kab. Pacitan	63.400.000,- Rp. 20.150.000,-	2.500.000,- 12.650.000,-	3,9 62,8	perjalanan identifikasi cpcl 1.900 ha benih padi inbrida; 1.350 ha benih jagung hibrida; 1 paket Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	3,9 100	

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pagu mamim, honor panitia dan narasumber tinggi, perjalanan luar daerah tidak terserap

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Solusi yang diusulkan adalah sebagaiberikut :

- a. Yang dicairkan sesuai standar daerah

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat salah satunya adalah pelayanan pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal, disebutkan bahwa SPM bidang pendidikan meliputi :

- a. SPM Pendidikan Anak Usia Dini
- b. SPM Pendidikan Dasar
- c. SPM Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Adapun target pencapaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Pencapaian Bidang Pendidikan

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Nilai (%)	Batas pencapaian
	INDIKATOR		
1	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun
2	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	Setiap tahun
3	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Setiap tahun

4.1.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Tabel 4.2

Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2020			Capaian SPM 2020		Realisasi Anggaran
					Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85,36		85,36		100	85,36	100	

2	Pendidikan Dasar	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,97		96,97		100	96,97	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3,06		3,06		100	3,06	100

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2020			SUMBER DANA		
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100		83,53	85,36	100%	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	APBD	75.000.000	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	APBD	324.914.800	
							Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	APBN		162.000.000

							Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)	APBN		337.939.000
							BOP PAUD (Hibah)	APBN		11.169.000.000
	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100		96,66	96,97	100%				
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	APBD	3.068.029.720	
							Bantuan Biaya Pendidikan Grindulu Mapan (Bansos)	APBD	629.000.000	
							Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	APBN		33.733.917.000
							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar	APBN		43.138.675.551
							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	APBN		16.763.014.275
							Program Indonesia Pintar	APBN		7.982.550.000
	Prosentase	100		2,71	3,06	100%	Penyediaan	APBN		446.518.000

	Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK)			
							Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	APBN		210.460.000
							BOP Kesetaraan (Hibah)	APBN		2.274.540.000

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dinas Pendidikan terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang (eselon III.b), 15 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 753 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan I/b 5 orang, golongan I/c 19 orang, golongan I/d 35 orang, golongan II/a 98 orang, golongan II/b 144 orang, golongan II/c 237 orang, golongan II/d 27 orang, golongan III/a 24 orang, golongan III/b 82 orang, golongan III/c 32 orang, golongan III/d 31 orang, golongan IV/a 17 orang, golongan IV/b 1 orang, dan golongan IV/c 1 orang.

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 4.4

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator SPM belum masuk ke dalam RPJMD dan Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bappeda untuk memasukkan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan
2	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 11.356 sasaran (penduduk usia 5-18 tahun) yang diduga (<i>suspect</i>) tidak berada di sekolah (https://dev-spm.dikdasmen.kemdikbud.go.id/). Data tersebut didapat dengan mencocokkan NIK di dukcapil dengan NIK di dapodik (aplikasi Kemendikbud) dan EMIS (aplikasi Kemenag).Data tersebut sudah mencantumkan <i>by name</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan dukcapil untuk mencari alamat sasaran tersebut
3	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan dukcapil untuk mencari alamat sasaran tersebut • Menugaskan pengawas dan Kepala Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan pengawas dan Kepala Sekolah

		<p>namun belum <i>byaddress</i> sehingga menyulitkan untuk verifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya petunjuk teknis yang lebih rinci dari kemendikbud tentang cara perhitungan pencapaian SPM pendidikan 	<p>untuk melakukan verifikasi terhadap 11.356 sasaran guna memastikan keberadaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan berdasarkan petunjuk/peraturan yang sudah ada
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bab II Menjelaskan ada 12 Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Adapun target pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Pencapaian Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	2021	95%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	2021	96%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	2021	94%
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100%	2021	87%

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%	2021	70%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%	2021	54%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	70%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100%	2021	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	2021	70%

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100%	2021	70%
----	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----

4.2.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada akhir tahun 2020 :

Tabel 4.7

Realisasi Pencapaian Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2020			Capaian SPM 2020	
		Indikator			Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92	2021	92	7228	92	6889	93,31
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94	2021	94	6900	94	6551	94,94
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	94	2021	94	6571	94	6530	99,38

		kesehatan bayi baru lahir							
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	86	2021	86	26246	86	23261	88,63
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100	2021	100	64287	100	64287	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	60	2021	60	337092	60	86051	25,53
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	50%	2021	50%	112269	50%	72572	64,45%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	60%	2021	60%	208588	60%	40851	19,58%

		standard							
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	100%	7761	100%	7761	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100%	2021	100%	1056	100%	1056	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	85%	2021	85%	5152	85%	1900	36,88%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	65%	2021	65%	8607	65%	6437	74,79%

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2020	Capaian, Target, Rencana Pembiayaan SPM				Sumber Dana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Tahun 2020				APBD	APBN
					Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/kegiatan	Rencana Pembiayaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	2021	91,52%	89%	95,31%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp540.597.947	√	
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	2021	91,16%	92%	94,99%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp2.447.008.700	√	

3	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	2021	94,98%	93%	99,38%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp1.899.930.976	√	
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100%	2021	92,19%	85%	88,63%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp2.231.215.302	√	
5	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	39,06%	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp656.575.396	√	
6	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan	100%	2021	42,26%	50%	25,53%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp1.050.276.293	√	

	sesuai standard									
7	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%	2021	68,19%	46%	64,45%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp365.06 2.360	√	
8	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	19,37%	50%	19,58%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp227.30 1.350	√	
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp251.60 1.350	√	
10	Presentase ODGJ berat yang	100%	2021	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulanga	Rp646.65 6.075	√	

	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard						n Penyakit Menular			
11	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	2021	57,60%	80%	36,88%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp1.120.984.008	√	
12	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100%	2021	90,88%	60%	74,79%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp540.597.947	√	

4.2.5 DUKUNGAN PERSONEL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Bidang Kesehatan didukung oleh dukungan personil di 24 Puskesmas, 3 Bidang, 1 Sekretariat dan 2

UPT di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

Pendidikan	BidangKesehatan	
	L	P
SD/MI	1	1
SLTP/MTS	6	6
SMA/SMK	68	83
D1	2	16
D2	1	0
D3	76	327
S1	58	99
S2	3	1
JUMLAH	215	537
TOTAL	752	

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2020 ini di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan terkait pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kurangnya Informasi mengenai pelayanan antenatal, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, Ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, kendala biaya, sosial budaya	Pendataan ibu hamil untuk K1 murni secara lebih intensif dengan kegiatan sweeping bumil K1 by name by address, peningkatan kapasitas bidan dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KIA di register kohort.

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan, akses ke fasyankes sulit/jauh, ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, kendala biaya, Sosial Budaya	Meningkatkan edukasi dan pemberian informasi ke masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi dan akses jalan dari rumah warga ke pelayanan kesehatan, baik di dalam maupun di luar kabupaten/kota
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir, akses ke fasyankes sulit/jauh, pelayanan yang tidak terapkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan di Luar wilayah kerja kab/Kota, kendala biaya, Sosial Budaya	Melakukan edukasi ke masyarakat melalui Meningkatkan kunjungan petugas kesehatan ke posyandu, rumah, tempat penitipan anak; melakukan pelayanan kesehatan termasuk imunisasi dasar, deteksi dini tumbuh kembang bayi dan penyuluhan perawat kesehatan bayi (konseling).
4	Pelayanan kesehatan balita	Kurangnya informasi mengenai pelayanan balita, akses ke fasyankes sulit, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, balita mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kab/Kota, kendala biaya, sosial	Memberikan edukasi kepada para orang tua saat pelaksanaan posyandu di wilayah setempat, Meningkatkan komunikasi dengan fasyankes swasta mengenai data terbaru serta berkoordinasi secara intens

		budaya	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Usia Pendidikan Dasar di luarsekolah tidakerskrining	Melakukan skrining rutin melalui stakeholder setempat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, Sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	Melakukan manajemen dan perapian data , melakukan inventaris alat dan mengupayakan peremajaan,
7	Pelayanan	Kurangnya informasi mengenai pelayanan	Meningkatkan keaktifan dari kader atau tenaga kesehatan untuk melakukan jemput bola.

	<p>kesehatan pada usia lanjut</p>	<p>kesehatan usia lanjut, sulitnya/jauhnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring Puskesmas ke Puskesmas, adanya usia lanjut yang mendapat pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, terbatasnya biaya, masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang disebabkan salah satunya oleh faktor sosial dan budaya, adanya kematian/mortalitas usia lanjut, perpindahan penduduk/migrasi, ketersediaan sumber daya terbatas</p>	<p>Pihak Puskesmas diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam posyandulansi guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan terutama keaktifan kader posyandu dan dukungan keluarga</p>
8	<p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p>	<p>Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi), sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan</p>	<p>Melakukan perapian data</p> <p>Memperbaiki manajemen informasi data</p> <p>Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penanganan penderita hipertensi</p>

		pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat penting nya pengobatan bagi penderita DM
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, Hambatan pada	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi ODGJ

		Sumber kesehatan	Daya
1 1	Pelayana n kesehatan orang Terduga Tubercolu sis	Penemuan penderit rendah, kepatuhan pengobatan rendah, stigma masih tinggi	Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tuberkolosis yang tidak terobati, dan memberikan informasi kemudahan pengobatan di fasyankes
1 2	Pelayana n kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Stigma masih tinggi	Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat perihal minimnya resiko penularan saat bersosialisasi dengan penderita dan memberikan informasi kepada penderita tentang fasilitas yang dapat diperoleh di fasyankes

7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

7.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 2 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Indikator Pencapaian pelayanan dasar yang diselenggarakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari :
 - Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik :
 - Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

7.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pacitan sebagaimana table berikut :

Tabel 4.11

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2020

7.3.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.12
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2020			Capaian SPM 2020		Realisasi Anggaran	
		Indikator	Nilai %		Target RPJMD %	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %		
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2020	58,95	347.722	58,95	357.410	60,59	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Rp. 1.666.481.250,00
										Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	Rp. 2.166.375.593,00
										Jumlah	Rp. 3.832.856.843,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2020	93,56	157.577	93,56	157.629	93,59	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi	Rp. 381.766.800,00
											Rp. 5.907.756.000,00
										Jumlah	Rp. 6.289.522.800,00

7.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2019 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Tahun 2020				APB D	APBN
					Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2020	59,11	58,95	60,59	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan: Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) Jumlah	Rp.1.672.060.000,00 Rp.2.768.730.000,00 Rp.4.440.790.000,00	V V	
2	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2020	92,10	93,56	93,59	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan: Penyediaan sarana dan prasarana air limbah Fasilitasi Penyediaan	Rp. 383.462.000,00 Rp.5.907.840.000,00	V V	

							sarana prasarana sanitasi Jumlah	Rp.6.291.302.000,00		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------	----------------------------	--	--

7.3.5 DUKUNGAN PERSONEL

Tabel 4.14

Dukungan Personel SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pendidikan	Bidang Cipt Karya	
	L	P
SLTA	3	1
S1	5	3
JUMLAH	8	4
TOTAL	12	

7.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM:

Tabel 4.15

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi topografi daerah, sebagian besar pegunungan 2. Ketersediaan air/sumber air baku terbatas 3. Kelembagaan pengelola air minum perdesaan sebagian besar belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari sumber-sumber air baru, embung dan aliran sungai yang mempunyai potensi untuk penyediaan air minum - Meningkatkan konservasi sumber daya air untuk kelestarian sumber air - Meningkatkan partisipasi masyarakat, BUMDES,

			<p>CSR dalam pembangunan dan pengembangan sarana air bersih</p> <p>- Meningkatkan pembinaan HIPPAM oleh OPD terkait</p>
2	<p>Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi masyarakat masih banyak yang tidak mampu 2. Sarana dan prasarana air bersih terbatas 3. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan bangunan masih kurang 	<p>Meningkatkan sosialisasi dan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan dan pendanaan</p>

7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

7.4.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat ada 2 Jenis Layanan Dasar yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

7.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pacitan sebagaimana table berikut :

Tabel 4.16

Target Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2020
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2020

7.4.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.17

Realisasi Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2020			Capaian SPM 2020		Realisasi Anggaran	
		Indikator			Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100 %	2020	0	24 unit	100%	24 unit	100%	Dana Bansos	Rp.300.000.00041.192.000.000
										Dana Operasional	Rp. 241.786.350
										Jumlah	Rp.541.786.350
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100 %	2020	92,41	1.133 unit	100%	1.133 unit	100%	Dana Bansos	Rp.5.812.500.000
										Dana Operasional	Rp. 122.489.600
										Jumlah	Rp.5.934.989.600

7.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2020 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber dana		
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Tahun 2020				Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
					Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%)	Program/Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100	2020	75,36%	100%	100%	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	0			
2	Fasilitasi penyediaan	100	2020	83,47%	100%	100%	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				

rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten						1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	159.025.000	v	
						2	Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	254.575.000	v	
						3	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK)	166.665.000		v

7.4.5 DUKUNGAN PERSONEL

- Sarjana Teknik Sipil/ Arsitek/ teknik lingkungan/ industry/ planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan pekerjaan Bidang Perumahan rakyat.
- Sarjana sosial / ilmu hukum/ ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perumahan.
- Diploma 3 yang sesuai atau yang sederajat.
- SMU yang sesuai atau yang sederajat.

Tabel 4.19

Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pendidikan	Bidang Perumahan	
	L	P
SD/MI	-	-
SLTP/MTS	-	-
SLTA/MA	1	1
D1	-	-
D2	-	-
D3	-	-
S1	2	-
S2	1	1
JUMLAH	4	2
TOTAL	6	

7.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM:

Tabel 4.20
Permasalahan dan
Solusi SPM Bidang
Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	4. Lokasi yang sangat jauh dari akses perekonomian dan penghasilan masyarakat yang rendah. 5. Akses Lokasi yang sulit	Harus dibantu dengan swadaya masyarakat setempat dan pendanaan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	4. Lokasi yang sangat jauh dari akses perekonomian dan penghasilan masyarakat yang rendah 5. Akses Lokasi yang sulit	Harus dibantu dengan swadaya masyarakat setempat dan pendanaan

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH TAHUN 2020

Target dan Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21

Target Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2020	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	2	100 %

2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun	594.757	100 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun	405.126	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun	250	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	300	100 %

4.5.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.22

Realisasi Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2020		Capaian SPM 2020	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)	Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun	2	100%	2	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun	594.757	100%	594.757	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun	405.126	100%	405.126	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun	250	100%	250	100%

5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	300	100%	345	115%
---	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	-----	------	-----	------

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD tahun 2020 dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 4.23

Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Tahun 2020				Sumber Dana
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	APBD
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	100 %	100 %	100 %	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal/Kegiatan Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda	124.581.000	APBD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun	100 %	100 %	100 %	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/kegiatan mitigasi bencana	576.080.000	APBD
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun	100 %	100 %	2,82 %	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/kegiatan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana	70.358.000	APBD

4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyela matan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun	100 %	100 %	0,87 %	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/kegiatan pencegahan bencana alam.	682.961.000	APBD
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyela matan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	100 %	100 %	115 %	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran/Kegiatan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)	144.406.900	APBD

4.5.5 DUKUNGAN PERSONEL

SATPOL PP Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas sampai akhir tahun 2020 didukung oleh 164 orang, terdiri dari :

Tabel 4.24

Dukungan Personel SPM Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pendidikan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Jumlah
	L	P	
SLTP/MTS	4	1	5
SLTA/MA	83	20	103
D2	1	0	1
D3	2	2	4

S1	36	11	47
S2	3	1	4
JUMLAH	129	35	164

5.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

➤ **Permasalahan**

- 1) Kesadaran ketaatan masyarakat terhadap PERDA dan Perkada masih rendah
- 2) Penyelenggaraan penanganan bencana kurang intensif
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

➤ **Solusi**

- 1) Peningkatan sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat
- 2) Menyiapkan regulasi penanggulangan bencana dan SOP
- 3) Intensifitas koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana
- 4) Peningkatan kesiap siagaan dan mitigasi bencana dalam menyikapi kondisi topografi
- 5) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait, Pengusaha serta Komunitas Masyarakat

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Nilai capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Pacitan dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.25
Target Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55%	2020
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55%	2020
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55%	2020
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55%	2020
5	Perlindungan Sosial Korban	Persentase (%) Korban	50%	2020

	Bencana Alam dan Sosial	Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota		
--	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4.6.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.26

Realisasi Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2020			Capaian SPM 2020		Realisasi Anggaran
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55%	2020	84,4%		55%	<u>174</u> 1.434	12,13 %	125.361.335
2	Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase (%) Anak Terlantar	55%	2020	84,4%		55%	<u>2164</u> 2164	100%	95.887.500

	Anak Terlantardi Luar Panti skala kab/kota	yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti								
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	55%	2020	84,4%		55%	$\frac{182}{1142}$	15,93 %	108.012.500
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	55%	2020	84,4%		55%	0	0	-
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	50%	2020	63,6%		50%	$\frac{250}{467}$	53,53 %	63.173.700

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27

Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2020			RENCANA PEMBIAYAAN	SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM/KEGIATAN		APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2020	25,73%	84,4%	12,13%	Program pembinaan eks-penyakit sosial (eks-narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		126.276.335	-

2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2020	100%	84,4%	100%	Program pembinaan eks-penyakit sosial (eks-narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		141.663.715	450.000.000
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2020	43,52%	84,4%	15,93%	Program pembinaan eks-penyakit sosial (eks-narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		141.663.715	-
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2020	100%	84,4%	0	Program pembinaan eks-penyakit sosial (eks-narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		-	-

5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100%	2020	100%	63,6%	53,53%	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		63.137.700	-
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	-------	--------	---------------------------------------------------------	--	------------	---

4.6.5 DUKUNGAN PERSONEL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

Tabel 4.28

Dukungan Personel SPM Bidang Sosial

PENDIDIKAN	BIDANG SOSIAL	
	L	P
SD/MI	1	-
SLTP/MTS	-	-
SLTA/MA	5	4
D1	-	-
D2	-	-
D3	-	-
S1	6	7
S2	7	-
JUMLAH	19	11
TOTAL	30	

7.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

➤ **Permasalahan**

1. Kurangnya anggaran untuk penanganan PSKS
2. Masih kurangnya SDM pada Dinas Sosial
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai
4. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan

-

➤ **Solusi**

1. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediannya sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PSKS
2. Meningkatkan koordinasi dan instansi terkait serta lintas sektor dalam penanganan PSKS

BAB V

PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2020 ini disajikan dalam beberapa aspek, yaitu tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan serta tataran penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan. Selain itu dilengkapi pula dengan tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) urusan wajib yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu SPM Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintahan dalam Negeri Sosial.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan terhadap Pemerintah dan Masyarakat untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan transparan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO